

SETWAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKJIP

2024

**SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI NTB**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Provinsi NTB disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang diamanatkan kepada setiap instansi pemerintah/perangkat daerah.

Tujuan penyusunan laporan LKjIP ini dibuat sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan. Selain berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* dalam perspektif yang lebih luas, LKjIP Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024 juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja yang terukur melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan yang memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa yang akan datang.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah-Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024 dapat diselesaikan. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Mataram, Januari 2025
SEKRETARIS DPRD PROVINSI NTB



Drs. H. SURYA BAHARI, MMPd.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680219 198811 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB	2
1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	2
1.4 PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS).....	3
1.5 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	4
1.6 SUMBER DAYA.....	12
1.7 TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	15
1.8 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1 PERENCANAAN.....	18
2.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH PROVINSI NTB TAHUN 2024-2026.....	18
2.3 TUJUAN	20
2.4 SASARAN	20
2.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA	201
2.6. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI	22
2.7. STRATEGI.....	23
2.8. ARAH KEBIJAKAN.....	23
2.9 PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN TAHUN 2024.....	24
2.10 RENCANA KINERJA TAHUNAN (TAHUN 2024).....	27
2.11 PERJANJIAN KINERJA (TAHUN 2024)	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	30
3.2 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024.....	33
3.3 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN 2021 DAN TAHUN TERAKHIR (2024).....	34

3.4 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH DALAM RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB TAHUN 2019-2024.....	34
3.5 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN STANDART NASIONAL (TIDAK ADA)	39
3.6 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.....	40
3.7 ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	47
3.8 CROSS CUTTING.	52
3.9 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA..	53
3.10 REALISASI ANGGARAN	55
BAB IV PENUTUP	57
4.1 KESIMPULAN	60
4.2 LANGKAH UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	66

DAFTAR GAMBAR

Daftar		HAL.
Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi NTB	5
Gambar 3.1	Kepuasan Responden terhadap 14 Unsur Pelayanan Sekretariat DPRD	35
Gambar 3.2	Nilai rata-rata kepuasan responden terhadap 14 unsur pelayanan Sekretariat DPRD.....	35
Gambar 3.3	Realisasi Anggaran berdasarkan Program Kegiatan Sekretariat DPRD NTB tahun 2024.....	59

DAFTAR TABEL

TABEL	HAL.
Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Non PNS Sekretariat DPRD NTB 13
Tabel 1.2	Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Provinsi NTB 13
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Non PNS Sekretariat DPRD Provinsi NTB..... 14
Tabel 1.4	Stuktur Anggaran Sekretariat DPRD TA. 2024 14
Tabel 1.5	Struktur Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Prov. NTB TA. 2024..... 15
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Tahun 2024-2029 20
Tabel 2.2	Target Renstra Sekretariat DPRD NTB Tahun 2024-2026 21
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Tahun 2024..... 22
Tabel 2.4	Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD NTB 22
Tabel 2.5	Tabel Program Kegiatan, SubKegiatan Sekretariat DPRD NTB Tahun 2024 24
Tabel 2.6	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024 27
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024 28
Tabel 2.8	Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024 28
Tabel 2.9	Anggaran Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024 29
Tabel 3.1	Interprestasi Hasil Survei 31
Tabel 3.1.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD 32
Tabel 3.1.2	Pencapaian Kinerja Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 33
Tabel 3.2	Capaian Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD NTB Tahun 2024..... 34
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya 34
Tabel 3.4	Capaian Target Kinerja Renstra Tahun 2024 39
Tabel 3.5	Pencapaian Kinerja Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Tahun 2024 39
Tabel 3.6	Capaian Indikator Urusan Pendukung Pemerintahan pada Sek.DPRD berdasarkan PK Tahun 2024..... 40
Tabel 3.7	Realisasi Fisik dan Keuangan pada Sekretariat DPRD Tahun 2024..... 42
Tabel 3.8	Tingkat Efiseinsi dan Efektifitas Kinerja Sekretariat DPRD..... 48
Tabel 3.9	Tabel Cross Cutting Kegiatan, Sub kegiatan pada Sekretariat DPRD NTB 52
Tabel 3.10	Capaian Indikator Urusan Bidang Administasi Pemerintahan pada Sekretariat DPRD Berdasarkan PK Tahun 2024..... 54
Tabel 3.11	Target Anggaran yang telah ditetapkan dan Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 56
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2024 59
Tabel 4.1	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024 61

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 dimaksudkan sebagai perwujudan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan wujud pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

LKjIP Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan/perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sehingga diperlukan pola pengukuran kinerja dimulai dari rencana strategis dan berakhir pada pengukuran kinerja atas kegiatan dan sasaran yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun indikator yang digunakan pada pengukuran ini adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator kinerja kegiatan yang berupa masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) dari kegiatan tahun 2024.

Capaian kinerja beberapa indikator pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024, sebagai berikut:

- A. TUJUAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DPRD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 Adalah: "Terwujudnya Layanan Kesekretariatan DPRD yang Berkualitas Melalui Pengelolaan Kelembagaan" dengan indikator "Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD" menggunakan survei yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Berdasarkan hasil survey tahun 2024 Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi NTB masuk kategori B (baik). Adapun hasil survei tersebut berdasarkan perhitungan skor kepuasan. Penilaian kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD menunjukkan skor kepuasan 3,20 Skala Likert, apabila dihitung dengan rentang kriteria diperoleh hasil sebesar 80,03 persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa "Tingkat Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD" termasuk dalam kategori B (baik). Hasil survei penilaian kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD NTB tahun 2024 termasuk dalam kategori B (baik), apabila dibandingkan dengan target Rencana Strategis pada tahun 2024 dengan kategori B (baik), maka capaian target rencana strategis untuk tahun 2024 yaitu 100 persen.
- B. Sedangkan CAPAIAN KINERJA SASARAN PADA SEKRETARIAT DPRD NTB PADA TAHUN 2024 menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu : "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah" dengan indikator: "Nilai Sakip Lingkup DPD" dan, "Meningkatnya Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD" dengan

indikator: "Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD", yang tertuang dalam lampiran Perjanjian Kinerja Antara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat. Untuk Indikator ke-1 (satu) yakni Nilai SAKIP Lingkup DPD pada tahun 2024 tercapai 72,05 dengan predikat BB dari target 79. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Provinsi NTB adalah "Sangat Baik". Kemudian capaian indikator ke-2 (dua) pada Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD tercapai 100 persen dengan target 100 persen, artinya dari 8 jumlah jenis fasilitasi pelaksanaan tugas pokok DPRD Provinsi NTB telah dilaksanakan seluruhnya oleh Sekretariat DPRD Provinsi NTB.

Kemudian Pada tahun anggaran 2024, Dana yang dialokasi pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB melalui APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami beberapa kali perubahan dan pergeseran setelah ditetapkannya APBD Murni Tahun 2024. APBD murni melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB Nomor : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 05 Januari 2024 sebesar Rp. 121.461.739.144, serta alokasi dana APBD Perubahan melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB Nomor : DPPA/A.3/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 11 Oktober 2024 sebesar Rp. 130.077.038.339,-. Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 120.568.582.054,- (92,69%) dan realisasi fisik rata-rata 96,40% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 9.508.456.285,- (7,31%). Realisasi berdasarkan program yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp.70.568.136.612,- (95,08%).
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD Rp.50.000.445.442,- (89,51%).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai salah satu bagian dari Pemerintahan Daerah Provinsi NTB, harus dapat menyusun rencana program, kegiatan, subkegiatan yang mendukung kinerja DPRD yang bersinergi dengan Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Tujuan dan Sasaran Organisasi yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat DPRD Provinsi NTB selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Sekretariat DPRD diharapkan mampu melakukan pembenahan kinerja dalam melaksanakan fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD sebagai lembaga legislative dan juga mampu meningkatkan peran serta fungsi Pendukung Kepala Daerah (Eksekutif) sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik (*Good Governance*). Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. *Good Governance* juga berarti implementasi kebijakan sosial-politik dan kinerja dari lembaga pemerintahan untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan hanya kemakmuran orang per orang atau kelompok tertentu.

Sehubungan dengan hal tersebut penyusunan LKjIP diharuskan sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama, tujuan dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Oleh karenanya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Sekretariat DPRD Provinsi NTB.

2. Mendorong Sekretariat DPRD Provinsi NTB didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat DPRD Provinsi NTB untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Sekretariat DPRD Provinsi NTB didalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB

DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi sehingga perlu diganti bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi. Sekretariat DPRD (SETWAN) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekretariat DPRD (SETWAN) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

SETWAN mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SETWAN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Susunan Organisasi SETWAN, terdiri dari:

- a. Sekretariat DPRD,
- b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan,
- c. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha,
- d. Bagian Keuangan,
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4 PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Kinerja Sekretariat DPRD dititikberatkan pada upaya peningkatan fungsi pelayanan kepada anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Peningkatan pelayanan kepada DPRD tidak terlepas dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat DPRD Provinsi NTB. Kinerja Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memerlukan dukungan dari berbagai unsur dalam memberikan pelayanan kepada anggota DPRD, Sekretariat DPRD dihadapkan pada permasalahan utama (isu strategis). Isu strategis adalah sebuah kondisi perkembangan/peristiwa/trend yang berkenaan dengan lingkungan organisasi dan berdampak terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan serta strategi-strategi organisasi. Isu strategis diperlukan untuk mempertahankan ataupun meningkatkan kinerja. Identifikasi isu strategis diawali dengan menganalisis pokok permasalahan yang dihadapi dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan kondisi lingkungan organisasi (internal maupun eksternal) yang berdampak terhadap strategi dan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Permasalahan Utama dan Isu-isu strategis Sekretariat DPRD Provinsi NTB diidentifikasi melalui serangkaian proses kemudian dirumuskan isu strategis dalam upaya peningkatan pelayanan kepada DPRD, diantaranya:

1. Ketersediaan sumber daya aparatur yang belum optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
2. Cepatnya perubahan instrument penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah ubahnya peraturan dari Pemerintah Pusat.
3. Belum Optimalnya peran Lembaga DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya yakni fungsinya yakni pembentukan perda, penganggaran dan pengawasan.

Berdasarkan permasalahan utama tersebut maka dirumuskan Isu Strategis dalam upaya peningkatan pelayanan kepada DPRD yaitu:

“Belum optimalnya peningkatan kualitas layanan dan kinerja lembaga legislatif.”

1.5 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

A. TUGAS DAN FUNGSI

Sekretariat DPRD Provinsi NTB mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Sekretariat DPRD Provinsi NTB mempunyai fungsi :

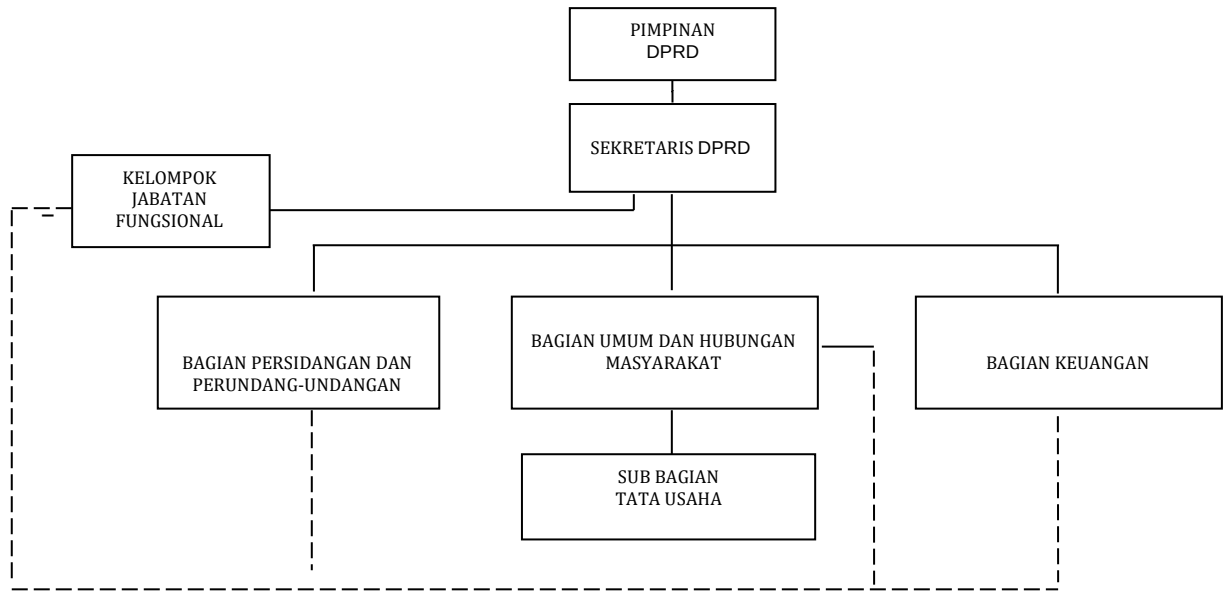
- a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat DPRD Provinsi NTB merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Sekretariat DPRD,
- b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan,
- c. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan
- d. Bagian Keuangan, dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi NTB sebagai berikut:



Sumber : Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2023

C. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

I. SEKRETARIS

➤ Rincian Tugas

- Merumuskan bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Persidangan dan Perundang-undangan, Rapat dan Risalah serta Keuangan;
- Merumuskan bahan kebijakan dan menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Kesekretariatan DPRD;
- Merumuskan bahan kebijakan dan menyelenggarakan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi kegiatan Kesekretariatan DPRD;
- Merumuskan bahan kebijakan dan menyediakan, serta mengoordinasi kelompok pakar atau tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai ketentuan yang berlaku;
- Merumuskan bahan kebijakan dan mengoordinasikan rencana kegiatan alat kelengkapan DPRD;
- Merumuskan bahan kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan asset/barang milik daerah pada Sekretariat DPRD;
- Merumuskan bahan kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Rapat-Rapat, Kunjungan Kerja, Konsultasi, Workshop, Reses, Hearing, dan kegiatan DPRD lainnya;
- Merumuskan bahan dan melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;

- i. Merumuskan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA kegiatan Sekretariat DPRD;
- j. Merumuskan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan Sekretariat DPRD;
- k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

➤ **Rincian Fungsi**

- a. Perumusan dan penyelenggaraan bahan/ materi kebijakan di bidang Kesekretariatan DPRD;
- b. Perumusan dan penyelenggaraan Rencana/Program kebijakan di bidang Kesekretariatan DPRD;
- c. Perumusan dan Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, serta Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- d. Perumusan dan Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- e. Perumusan dan Penyediaan, pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah;
- f. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

II. BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

➤ **Rincian Tugas**

- a. Menyusun bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Rapat dan Risalah, Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi, serta Perundang-undangan Dokumentasi dan Perpustakaan;
- b. Menyusun bahan kebijakan dan menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- c. Menyusun bahan kebijakan dan memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah, penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif, serta penyelenggaraan persidangan;
- d. Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan, serta mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
- e. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris masalah (DIM) dan risalah rapat, serta mengoordinasikan pembahasan Raperda;
- f. Menyusun bahan kebijakan dan menyelenggarakan hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolan;
- g. Menyusun bahan kebijakan dan mengoordinasikan layanan dan penyediaan bahan rapat, persidangan dan penyusunan risalah;

- h. Menyusun bahan kebijakan dan mengoordinasikan layanan rapat kegiatan alat kelengkapan Dewan dan kegiatan fraksi DPRD;
- i. Menyusun bahan kebijakan dan mengadministrasikan kegiatan layanan Perundang-undangan, dokumentasi dan perpustakaan;
- j. Menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan, koordinasi fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
- k. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Persidangan dan Perundangundangan;
- l. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Persidangan dan Perundang-undangan;
- m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

➤ **Rincian Fungsi**

- a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan/ materi kebijakan di bidang Persidangan dan Perundang-undangan;
- b. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan Rencana/Program kebijakan di bidang Persidangan dan Perundang-undangan;
- c. Penyusunan kebijakan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- d. Penyusunan kebijakan dan Penyediaan, pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah;
- e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

III. BAGIAN UMUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

➤ **Rincian Tugas**

- a. Menyusun bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Urusan Dalam dan Pengamanan Dalam, Humas, Protokol dan Perjalanan, serta Tata Usaha;
- b. Menyusun bahan kebijakan dan menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD, pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD, pengelolaan asset/ Barang Milik Daerah;
- c. Menyusun bahan kebijakan dan mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD, administrasi keanggotaan DPRD; serta tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;

- d. Menyusun bahan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD, serta menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
- e. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- f. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- g. Menyusun rencana, program dan petunjuk teknis lingkup tata usaha, kepegawaian, urusan dalam, rumah tangga, ketertiban keamanan, humas dan protokol;
- h. Menyusun bahan kebijakan dan melaksanakan kegiatan tata usaha, kepegawaian, urusan dalam, rumah tangga, ketertiban keamanan, humas dan protokol;
- i. Menyusun bahan kebijakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup tata usaha, kepegawaian, urusan dalam, rumah tangga, ketertiban keamanan, humas dan protokol;
- j. Menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
- k. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Umum dan Humas;
- l. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Umum dan Humas;
- m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

➤ **Rincian Fungsi**

- a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan/ materi kebijakan di bidang Umum dan Humas;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana/Program kebijakan di bidang Umum dan Humas;
- c. Penyusunan kebijakan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- d. Penyusunan kebijakan dan Penyediaan, pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah.
- e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Sub Bagian Tata Usaha

➤ **Rincian Tugas**

- a. Menyiapkan bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Tata Usaha;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan dan menyusun rencana/ program kebijakan teknis Tata Usaha;

- c. Menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan suratmenyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD, melaksanakan kearsipan, menyusun administrasi kepegawaian, serta menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- d. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli dan menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar Urut kepangkatan dan formasi pegawai;
- e. Menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan administrasi dan kearsipan biodata pimpinan dan anggota DPRD;
- f. Menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan pengawasan dan pembinaan disiplin pegawai;
- g. Menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kearsipan, serta penggandaan, pendistribusian naskah dinas;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi;
- i. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Tata Usaha;
- j. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Tata Usaha;
- k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

IV. BAGIAN KEUANGAN

➤ Rincian Tugas

- a. Menyusun bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Perencanaan, Tata Usaha Keuangan serta Verifikasi dan Pembukuan;
- b. Menyusun bahan kebijakan dan memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- c. Menyusun bahan kebijakan dan memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan Pembahasan APBD/APBDP, Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, serta laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- d. Menyusun bahan kebijakan dan memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah, serta terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- e. Menyusun bahan kebijakan dan memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat, mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan, pelaksanaan penegakan kode etik DPRD; memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat, mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan, serta pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;

- f. Menyusun bahan kebijakan dan memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran, pengawasan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD, serta persetujuan kerjasama daerah;
- g. Menyusun rencana, program dan petunjuk teknis kegiatan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- h. Menyusun bahan kebijakan dan melaksanakan kegiatan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- i. Menyusun bahan kebijakan Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- j. Menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
- k. Menyusun bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA kegiatan Sekretariat DPRD;
- l. Menyusun bahan laporan kinerja instansi pemerintah, LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan Sekretariat DPRD;
- m. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Keuangan;
- n. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Keuangan;
- o. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

➤ **Rincian Fungsi**

- a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan/ materi kebijakan di bidang Keuangan;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana/Program kebijakan di bidang Keuangan;
- c. Penyusunan kebijakan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- d. Penyusunan kebijakan dan Penyediaan, pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah.
- e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

V. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 11 Tahun 2024 disebutkan bahwa Penetapan Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama

sesuai dengan keahlian dan ketrampilan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas wajib berkoordinasi kepada Pejabat Administrator dan/atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. Adapun tugas dan fungsi jabatan fungsional yang ada pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB sebagai berikut:

Jenis-Jenis Fungsional pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB.

1. Fungsional Analis Kebijakan

Fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah. Kajian dan Analisis Kebijakan adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik.

2. Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyiapkan, mengolah, dan merumuskan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsional Perisalah Legislatif

Fungsional Perisalah Legislatif adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang risalah legislative yang meliputi penyusunan risalah rapat, penyusunan dokumen kelengkapan risalah rapat, penyusunan analisis dan anotasi himpunan risalah rapat, serta pengembangan sistem risalah rapat legislatif.

4. Fungsional Perencana

Secara umum tugas jabatan fungsional perencana adalah membantu Pimpinan dalam menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

5. Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah

Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah terutama yang berkaitan dengan aspek peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, sistem dan prosedur, sarana dan prasarana, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan, dilakukan pada sebagian atau keseluruhan siklus pengelolaan keuangan negara dan daerah.

6. Fungsional Hubungan Masyarakat

Tugas dan Fungsi Fungsional Hubungan Masyarakat adalah membangun dan mempertahankan citra atau kesan yang baik. Citra positif lembaga merupakan tujuan akhir setiap kegiatan kehumasan. Humas sangat berperan dalam memberikan informasi kepada publik internal dan publik eksternal dengan menyediakan informasi yang akurat dan dalam format yang mudah dipahami. Kegiatan kehumasan yang paling umum adalah menulis, menyunting (editing), editing foto dan video, mengelola media internal, termasuk pengelolaan website dan media sosial, membuat *press release* (rilis), menggelar konferensi pers, dan kunjungan ke media (*media visit*).

7. Fungsional Arsiparis

Fungsional Arsiparis adalah jabatan fungsional tertentu diduduki oleh Arsiparis PNS yang mempunyai ruang lingkup fungsi, dan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis menjadi informasi publik pada Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, dan Perguruan Tinggi Negeri.

8. Fungsional Pranata Komputer

Fungsional Pranata Komputer adalah melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia.

1.6 SUMBER DAYA

Pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun pertama penyelenggaraan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB Tahun 2024-2026. Sekretariat DPRD Provinsi NTB sebagai Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan melaksanakan 2 (dua) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan dan 73 (tujuh puluh tiga) subkegiatan. Sekretariat DPRD

Provinsi NTB Tahun 2024 mengelola anggaran sebesar Rp. 130.077.038.339,- yang merupakan gabungan antara Anggaran DPRD dan Anggaran Sekretariat DPRD, sampai dengan Bulan Desember 2024 terealisasi sebesar Rp. 120.568.582.054,- (92,69%). Realisasi keuangan program dan kegiatan Tahun 2024 adalah rata-rata sebesar 92,69%, dan realisasi fisik rata-rata 96,40%.

1.6.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ditunjang oleh sumber daya yang dimiliki. Sumber Daya Manusia merupakan sumber daya utama dalam menjalankan fungsi organisasi untuk mencapai tujuan (goal) yang diharapkan. Jumlah sumber daya manusia yang tersedia dapat menjadi tolok ukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat DPRD Provinsi NTB didukung oleh 119 (seratus sembilan belas) personil PNS dan 157 (seratus lima puluh tujuh) Non ASN. Berikut data dan kondisi Sumber Daya Manusia (pegawai) berdasarkan jabatan, golongan, tingkat pendidikan, jenis kelamin yang tersedia pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB sebagaimana tabel 1.1 dan 1.2 dibawah ini.

Tabel 1.1 Data PNS / Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi NTB
Berdasarkan Jenis Jabatan dan Golongan Tahun 2024

NO.	URAIAN	JUMLAH	NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	1	2	3
1	Eselon II	1	1.	Golongan IV	5
2	Eselon III	3	2.	Golongan III	75
3	Eselon IV	1	3.	Golongan II	37
4	Fungsional Khusus	11	4.	Golongan I	2
5	Fungsional Umum	103	Total		119
Total		119			

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Prov. NTB Tahun 2024

Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa pegawai yang mendominasi adalah pegawai berpendidikan Diploma ke atas (golongan III dan IV) sebanyak 67 orang atau 56,30%, dan tingkat pendidikan SMA ke bawah mencapai 43,70% hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi NTB sudah lebih baik dan telah meningkat dibanding 1 (satu) atau 2 (dua) tahun lalu.

Tabel 1.2 Data Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	S2	10
2	S1/D4	52
3	D3	4
4	D2	1
5	SMA/SEDERAJAT	48
6	SMP	3
7	SD	1

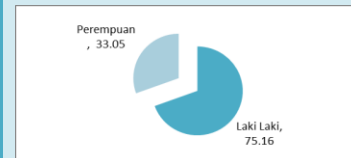
NO.	URAIAN	JUMLAH
	Total	119

Sumber: Sub Bagian TU Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024

Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat DPRD Provinsi NTB selain PNS juga terdapat Pegawai Tidak Tetap sebanyak 3 orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 153 orang. SDM Non PNS pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Non PNS Sekretariat DPRD Provinsi NTB

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Pegawai Tidak Tetap	2	1	3
2.	Tenaga Kontrak	115	38	153
TOTAL		117	39	156



Sumber: Sub Bagian TU Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024

1.6.2 SARANA PRASARANA

Sekretariat DPRD Provinsi NTB untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka menunjang tugas-tugas pelayanan pada pimpinan dan anggota DPRD didukung oleh sarana dan prasarana yang pengadaannya setiap tahun mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan para anggota DPRD. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi NTB dapat dikategorikan memenuhi syarat standart minimal yang memungkinkan pelayanan terhadap anggota DPRD dapat lebih optimal. Sarana dan Prasarana yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi NTB adalah Sarana dan Prasarana pada kondisi akhir tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 1.4 dibawah ini.

Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024

NO	NAMA ASET	JUMLAH*	
1	2	3	
1	Alat-alat Besar	18	Buah
2	Alat-alat Angkutan	90	Buah
3	Alat Pertanian	18	Buah
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.247	Buah
5	Alat Studio dan Alat Komunikasi	460	Buah
6	Alat-alat Kedokteran	1	Buah
7	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	229	Buah
8	Bangunan Gedung	23	Buah
9	Monumen	2	Buah
10	Jalan dan Jembatan	1	Buah
11	Instalasi	4	Buah
12	Jaringan	32	Buah
13	Barang Bercorak Kebudayaan	9	Buah

Sumber : Sub Bagian Urusan Dalam dan Pengamanan Dalam Tahun 2023* Data Sementara

1.6.3 Keuangan

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024 disajikan pada tabel 1.5 dibawah ini:

Tabel 1.5 Struktur Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Prov. NTB TA. 2024

URAIAN	ANGGARAN
1	2
SEKRETARIAT DPRD PROV. NTB	130.077.038.339
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	74.219.854.919
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	55.857.183.420

Sumber : DPPA DPRD dan Sekretariat DPRD Prov. NTB Tahun 2024

1.7 TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menegaskan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Pemerintah Provinsi NTB dalam penyelenggaraan pembangunan, telah berupaya dan bertekad menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada masyarakat melalui organisasi publik atau Perangkat Daerah secara periodik. Setiap Perangkat Daerah diharapkan dapat membuat suatu Rencana Strategis (*strategic plan*), Rencana Kinerja (*performance plan*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*performance accountability report*).

Berdasarkan ketentuan di atas, maka seluruh instansi pemerintah, termasuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB, berkewajiban menyusun LKjIP yang dapat dijadikan sebagai salah satu *tools* bagi *stakeholder* (pimpinan, penilai akuntabilitas dan masyarakat) untuk melakukan supervisi yang diperlukan dalam rangka melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja instansi Pemerintah serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pejabat suatu instansi Pemerintah. Penerapan LKjIP akan membawa

konsekuensi terhadap perlunya perubahan-perubahan di beberapa segmen atau subsistem dari administrasi negara. Dimana, dalam proses penganggaran sebagaimana disebutkan di atas *incremental budgeting system* seharusnya sudah ditinggalkan. Sedangkan *budget line system* harus dipandang sebagai klasifikasi mata anggaran saja. Naik turunnya penyediaan anggaran dipandang akan dapat berpengaruh pada naik turunnya hasil yang diinginkan. Oleh karenanya, LKjIP yang disusun Sekretariat DPRD Provinsi NTB memiliki dua fungsi utama yaitu :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dua fungsi utama LKjIP tersebut pada dasarnya merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dalam penyampaian LKjIP oleh setiap instansi Pemerintah.

1.8 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Provinsi NTB tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang, gambaran umum Sekretariat DPRD Provinsi NTB, aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Provinsi NTB, Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTB, Sumber Daya Perangkat Daerah, Tujuan Penyusunan Laporan dan Sistematika penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini menyajikan Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi NTB, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah, Program, Kegiatan dan Subkegiatan, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan Capaian Kinerja Organisasi, Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Lalu dan Tahun 2024, Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah dalam Renstra, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai,

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya, Cross Cutting, Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini menyajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB serta langkah untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN

Rencana Strategis berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Kepala Unit Kerja dengan menggunakan sedapat mungkin 3 (tiga) tolok ukur, yaitu masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*). Penyusunan rencana strategis yang meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan program juga mempertimbangkan perspektif-perspektif *Stakeholder*, *Internal Business Process*, *Learning dan Growth* serta *Financial* sehingga dapat mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya.

Dokumen rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Rencana Kinerja adalah rencana yang ingin di capai atas kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Selain itu juga berisi informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dan program. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program dan kegiatan beserta indikator kinerjanya sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan rencana strategisnya.

2.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2024-2026

Visi Indonesia Emas Tahun 2045 merupakan langkah pemerintah dalam membangun Indonesia untuk menjadi Megatrend Dunia yang semakin sarat akan persaingan yang sangat ketat. Pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut membangun pilar Visi Indonesia 2045 sebagai bahan acuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian menjadi acuan setiap langkah pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Pencapaian impian dan visi Indonesia 2045 dibangun dengan 4 pilar berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar berbangsa, bernegara dan konstitusi.

4 Pilar Visi Indonesia 2045 tersebut yaitu:

1. Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
3. Pemerataan Pembangunan
4. Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan

Adapun tujuan 4 Pilar Indonesia sebagai berikut:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sekretariat DPRD Provinsi NTB bukan merupakan lembaga teknis daerah sehingga tidak terdapat tugas dan fungsi yang berhubungan langsung dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga Teknis di Pemerintah Pusat serta tidak secara langsung berhubungan dengan rencana strategis kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut maka Renstra Revisi Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 tidak menjabarkan Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota.

Pembangunan Provinsi NTB selaras dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat. Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah tahap ke-empat dalam dokumen RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025. Ultimate Goal RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 adalah: "***Terwujudnya Transformasi Ekonomi Melalui Peningkatan Produktifitas Daerah Menuju NTB Sebagai Lokomotif pertumbuhan Ekonomi Regional, Bali dan Nusa Tenggara Yang Inklusif dan Berkelanjutan***".

Dalam rangka mewujudkan Ultimate Goal Rencana Pembangunan Daerah untuk Membangun Nusa Tenggara Barat yang Kuat, NTB yang Lestari dan Asri, NTB yang semakin Mandiri, Meningkatnya Tata Kelola Daerah melalui Reformasi Birokrasi, serta Tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDG's dan Peningkatan Daya Saing, ditetapkan 3 (tiga) Pilar Utama dan 3 (tiga) Pilar Pendukung RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Pilar Utama 1 | : | PEMBANGUNAN MANUSIA BERKUALITAS,
Meningkatnya Kualitas Manusia NTB yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Takwa (KUAT) |
| Pilar Utama 2 | : | PEMBANGUNAN LINGKUNGAN YANG ASRI DAN LESTARI,
Meningkatnya Kualitas Lingkungan NTB yang Lestari dan Asri |
| Pilar Utama 3 | : | PEMBANGUNAN MASYARAKAT NTB SEJAHTERA,
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat NTB yang semakin Mandiri. |
| Pilar Pendukung 1 | : | TATA KELOLA,
Meningkatnya Tata Kelola Daerah melalui Reformasi Birokrasi |
| Pilar Pendukung 2 | : | SDG's,
Meningkatnya Capaian Kinerja SDG's Untuk Mewujudkan Komitmen Global |
| Pilar Pendukung 3 | : | DAYA SAING DAERAH,
Meningkatnya Daya Saing Daerah Untuk Akselerasi Investasi Industrialisasi |

Mengacu pada Pilar Utama dan Pilar Pendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB Tahun 2024-2026, Sekretariat DPRD Provinsi NTB sebagai salah satu perangkat daerah Provinsi NTB memiliki kewajiban untuk turut serta mewujudkan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD), terutama pada **Tujuan ke-5 RPD, “Terwujudnya Peningkatan Tata kelola Pemerintahan Daerah”** dengan **Sasaran ke-8 “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pola Pikir, Kelembagaan, Regulasi dan Perundang-undangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Ketatalaksanaan, Akuntabilitas, Pengawasan dan Pelayanan Publik”**.

2.3 Tujuan

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024 sesuai dengan RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 yaitu mendukung Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD), terutama pada Tujuan ke-5 RPD, **“Terwujudnya Peningkatan Tata kelola Pemerintahan Daerah”** dengan Sasaran ke-8 **“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pola Pikir, Kelembagaan, Regulasi dan Perundang-undangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Ketatalaksanaan, Akuntabilitas, Pengawasan dan Pelayanan Publik”**, maka Sekretariat DPRD Provinsi NTB selaku Organisasi Perangkat Daerah Pendukung, menetapkan **Tujuan** dan **Sasaran** untuk Tahun 2024-2026 yaitu:

Tabel 2.1 Tujuan Dan Sasaran Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Layanan Kesekretariatan DPRD yang Berkualitas Melalui Pengelolaan Kelembagaan		Tingkat Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Baik
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Lingkup OPD	Point BB (79)
		Meningkatnya Cakupan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024

2.4 Sasaran

Sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi NTB selama 3 (tiga) tahun ke depan periode 2024-2026 juga disertai dengan indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan patokan/tolok ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi. Untuk mewujudkan tujuan **“Terwujudnya Layanan Kesekretariatan DPRD yang Berkualitas Melalui Pengelolaan Kelembagaan”**. Sekretariat DPRD Provinsi NTB menetapkan sasaran yaitu :

1. “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”

2. “Meningkatnya Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD”.

Hubungan antara tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Provinsi NTB beserta indikator sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Provinsi NTB yang tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Target Renstra Sekretariat DPRD 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA			FORMULASI PENGUKURAN
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya Layanan Kesekretariatan DPRD yang Berkualitas Melalui Pengelolaan Kelembagaan			Tingkat Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Kategori	Baik	Baik	Sangat Baik	Kategori yang diberikan sebagai Hasil Survei tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD Sumber Data : Kuisioner
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP OPD	Nilai	Point BB (79)	Point A (82)	Point A (85)	Hasil Penilaian SAKIP 2021 oleh TIM SAKIP NTB
	Meningkatnya Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase	100%	100%	100%	Data Sekretariat DPRD NTB
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Nilai	Point BB (79)	Point A (82)	Point A (85)	Hasil Penilaian SAKIP 2021 oleh TIM SAKIP NTB
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase	100%	100%	100%	Data Sekretariat DPRD NTB

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024

2.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sekretariat DPRD Provinsi NTB mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi NTB dan mengerjakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi NTB sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan tugas tersebut Sekretariat DPRD Provinsi NTB mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Indikator Kinerja Utama adalah indikator yang menjelaskan mengenai kinerja utama untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Selain itu, Indikator Kinerja Utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk ke depannya. Sehingga mereka pun bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap Lembaga/Instansi Pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Dengan merumuskan Indikator Kinerja Utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini.. Berdasarkan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Provinsi NTB merumuskan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	2	3
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Lingkup OPD	Formulasi Pengukuran: Aspek Penilaian SAKIP : A. Perencanaan Kinerja (30%) B. Pengukuran Kinerja (25%) C. Pelaporan Kinerja (15%) D. Evaluasi Internal (10%) E. Pencapaian Sasaran//Kinerja Organisasi (20%) Sumber Data: Hasil Penilaian Tim SAKIP NTB
Meningkatnya Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Formulasi Pengukuran: Jumlah Fasilitasi Kegiatan dan Pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB. Sumber Data: Data Internal Sekretariat DPRD NTB

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024

2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					PROYEKSI 2025*	CATATAN ANALISIS
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TUJUAN: Terwujudnya layanan kesekretariatan DPRD yang berkualitas Melalui Pengelolaan Kelembagaan	Tingkat Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
	SASARAN 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Lingkup OPD	Nilai/Point	Nilai BB	Nilai BB	Nilai BB	Nilai BB	Nilai BB	Nilai BB	Nilai BB	Nilai BB	Nilai BB (73.09)	Nilai BB (72.05)	Nilai BB	
	SASARAN 2: Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
1		Rancangan Peraturan Daerah Yang Dibahas dan Disetujui	Perda	16	16	12	12	12	14	11	16	8	12	12	
2		Kegiatan Hearing/Dialog Pimpinan Dan Anggota DPRD Dengan Pejabat	Kali/Orang	480	120	48	480	480	540	60	1.077	925	895	480	

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					PROYEKSI 2025*	CATATAN ANALISIS
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Yang Difasilitasi													
3		Rapat Kelengkapan Alat Dewan Yang Difasilitasi	Kali	252	480	480	480	225	268	540	192	207	193	480	
4		Rapat Paripurna Yang Difasilitasi	Kali	48	252	48	48	46	46	268	40	42	65	46	
5		Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Difasilitasi	Kali	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	
6		Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang Difasilitasi	Kali	28	2860	2860	2860	1950	28	2898	4918	3182	4859	2860	
7		Kegiatan Peningkatan Kapasitas (Bintek/Workshop) Yang Diikuti Oleh Pimpinan dan Anggota DPRD	Kali/Orang	3	65	65	65	65	3	65	65	65	249	65	
8		Publikasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Difasilitasi	Kali	32	32	36	36	36	39	53	53	68	34	36	

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2024

2.7 STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi NTB dan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Provinsi NTB. Sekretariat DPRD Provinsi NTB menyusun strategi sebagai berikut:

1. Penyediaan Tenaga Ahli, Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Ketersediaan Data dan Informasi.
2. Memfasilitasi Koordinasi Antara Pihak Legislatif dengan Eksekutif.

2.8 ARAH KEBIJAKAN

Strategi yang digunakan Sekretariat DPRD Provinsi NTB selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Arah Kebijakan yang digunakan sebagai arah dalam menentukan program, kegiatan, subkegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, sebagai berikut:

1. Optimalisasi Penyediaan Tenaga Ahli
2. Meningkatkan Kompetensi Dan Profesionalisme Aparatur.
3. Meningkatkan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan.
4. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan.

5. Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi.
6. Optimalisasi Dukungan dan Layanan Prima Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
7. Optimalisasi Fasilitasi Koordinasi antara Legislatif dengan Eksekutif.
8. Meningkatkan Tata Kelola Kelembagaan Pemerintahan yang Profesional, Baik dan Bersih di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi NTB.
9. Peningkatan Kualitas Layanan Persidangan, Pengembangan Strategi dan Komunikasi Parlemen, Penataan dan Pelatihan SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Produk Perundang-Undangan Seperti Naskah Akademik.
10. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Pengelolaan SDM Aparatur, Penataan Organisasi, Perencanaan, Pengelolaan Kinerja, Pengelolaan Keuangan dan Pengadministrasian Barang Milik Negara dan Perjalanan Dinas.

2.9 PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN TAHUN 2024

Dalam rangka pencapaian Tujuan, Sasaran Pembangunan Pemerintah Provinsi NTB, Sekretariat DPRD Provinsi NTB, menindaklanjutinya dalam kebijakan operasional yang akan memberikan arah dan kesatuan konsep pembangunan dalam periode tahun 2024-2026 dalam bentuk Program, Kegiatan, Subkegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Sekretariat DPRD NTB Tahun 2024

NO	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	JUMLAH DAN SATUAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN (PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	100%	Tingkat Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	130.077.038.339
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Point 88	Nilai SAKIP DPD	74.219.854.919
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	576.441.700
1	4.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	186.337.900
2	4.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	83.834.100
3	4.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	93.733.600
4	4.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	13.048.300
5	4.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	30.184.000
6	4.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.292.400
7	4.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	129.011.400
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.930.918.043
8	4.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	123 Org/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14.359.262.193
9	4.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	316.083.600
10	4.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7500 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	223.923.250
11	4.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.173.600
12	4.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1.475.400

NO	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	JUMLAH DAN SATUAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN (PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	37.962.000
13	4.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.531.000
14	4.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.521.000
15	4.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	29.910.000
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	1.460.323.700
16	4.02.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	470.250.000
17	4.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	1 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	750.604.500
18	4.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	39.959.200
19	4.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22.000.000
20	4.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	20 Org	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	177.510.000
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	5.764.775.050
21	4.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	72.680.000
22	4.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	629.229.650
23	4.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	267.240.300
24	4.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	102.788.000
25	4.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	170.680.000
26	4.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.631.100.000
27	4.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.791.595.000
28	4.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	24.796.100
29	4.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	74.666.000
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	537.529.660
30	4.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	1 Paket	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	355.264.660
31	4.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	182.265.000
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	6.252.769.520
32	4.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	78.849.000
33	4.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	964.000.000
34	4.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5.209.920.520
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	2.058.082.000
35	4.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	167.600.000
36	4.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	730.470.000
37	4.02.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	6 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	17.500.000
38	4.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	355.446.000
39	4.02.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1 Unit	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	35.000.000
40	4.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	752.066.000
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	3 Jenis Layanan	Jumlah jenis layanan administrasi DPRD	41.721.238.426

NO	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	JUMLAH DAN SATUAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN (PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
41	4.02.01.1.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	65 Org/ Bulan	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	41.113.488.426
42	4.02.01.1.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	2 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	607.750.000
	4.02.01.1.06	Layanan Administrasi DPRD	4 Jenis Layanan	Jumlah jenis layanan administrasi DPRD	879.814.820
43	4.02.01.1.06.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	311.184.220
44	4.02.01.1.06.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	148.630.600
45	4.02.01.1.06.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	3 Paket	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	420.000.000
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	100 Persen	Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	55.857.183.420
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	9 Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	1.541.334.500
46	4.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	293.218.500
47	4.02.02.1.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1.213.336.000
48	4.02.02.1.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	34.780.000
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	5 Laporan	Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	654.466.200
49	4.02.02.1.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	92.966.200
50	4.02.02.1.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	92.609.000
51	4.02.02.1.02.03	Pembahasan APBD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	142.801.000
52	4.02.02.1.02.04	Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	203.509.000
53	4.02.02.1.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	122.581.000
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	5 Laporan	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	608.583.570
54	4.02.02.1.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	125.118.500
55	4.02.02.1.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	118.123.170
56	4.02.02.1.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	130.477.330
57	4.02.02.1.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	118.123.170
58	4.02.02.1.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	116.741.400
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	65 Orang	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	4.690.744.800
59	4.02.02.1.04.01	Orientasi DPRD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan Orientasi DPRD	1.097.931.600
60	4.02.02.1.04.02	Bimbingan Teknis/Pendalaman Tugas DPRD	65 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	987.799.500
61	4.02.02.1.04.05	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	100 Orang	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	789.400.000
62	4.02.02.1.04.06	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	454.760.200
63	4.02.02.1.04.07	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	25.500.000
64	4.02.02.1.04.08	Penyusunan Program Kerja DPRD	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	14.298.500
65	4.02.02.1.04.04	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.321.055.000
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3 Laporan	Jumlah laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi Masyarakat	26.640.116.150
66	4.02.02.1.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	8.753.600.000
67	4.02.02.1.05.02	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	64.555.000
68	4.02.02.1.05.03	Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	17.821.961.150
	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan	Jumlah laporan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	68.953.800

NO	KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	JUMLAH DAN SATUAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN (PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
69	4.02.02.1.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	1 Dokumen	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	39.861.400
70	4.02.02.1.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	29.092.400
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	5 Jenis Fasilitasi	Jumlah jenis fasilitasi tugas DPRD	21.652.984.400
71	4.02.02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	20.654.400.000
72	4.02.02.1.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	78.556.500
73	4.02.02.1.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	920.027.900

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024

2.10 RENCANA KINERJA TAHUNAN (TAHUN 2024)

Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) NTB tahun 2024-2026, Sekretariat DPRD Provinsi NTB menyusun perencanaan Program, Kegiatan, Subkegiatan. Dimana Program Kegiatan yang telah ditentukan merupakan program-kegiatan prioritas perangkat daerah sesuai dengan Tujuan Pembangunan Pemerintah Provinsi NTB. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-OPD) Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024, Program yang dilaksanakan dan menjadi kewenangan Sekretariat DPRD Provinsi NTB adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD,

Sedangkan Rincian Kegiatan/Major Project Sekretariat DPRD Provinsi NTB, sebagaimana berikut:

Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024

NO	TUJUAN / SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN RINCIAN KEGIATAN	SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA			KONDISI AKHIR 2026	PROGRAM
			INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Terwujudnya layanan kesekretariatan DPRD yang berkualitas Melalui Pengelolaan Kelembagaan		Tingkat Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Baik	Baik	Baik	
	Meningkatnya Kualitas Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP Lingkup OPD	Nilai 88 (79)	Nilai 88 (72,05)	Nilai A	
	Meningkatnya Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi		Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	100%	100%	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Cakupan Perda yang Diinisiasi DPRD	100%	100%	100%	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD
			Cakupan Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif yang Ditindaklanjuti	100%	100%*	100%	
		Rancangan peraturan daerah yang dibahas dan disetujui	jumlah rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD yang disusun	12 Perda	12 Perda	12 Perda	
		Kegiatan hearing/dialog pimpinan dan anggota DPRD dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama yang difasilitasi	Jumlah hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	480 orang	895 orang*	480 Orang	
		Rapat alat kelengkapan dewan yang difasilitasi	jumlah rapat alat kelengkapan dewan	225 kali	193 kali*	480 Kali	
		Rapat paripurna yang difasilitasi	jumlah rapat paripurna	46 kali	39 kali	46 Kali	

NO	TUJUAN / SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN RINCIAN KEGIATAN	SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA			KONDISI AKHIR 2026	PROGRAM
			INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
		Kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi	jumlah kegiatan reses anggota DPRD	2 kali	2 kali	3 Kali	
		Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi	Jumlah SPPD kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	1950 SPPD	5.395 SPPD	2860 SPPD	
		Kegiatan peningkatan kapasitas (bimtek/workshop) yang diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD	jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang mengikuti bimtek/workshop/ pelatihan lainnya	65 orang	130 orang	65 Orang	
		Publikasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi	jumlah sosialisasi/publikasi kegiatan DPRD	36 kali	34 kali	36 Kali	

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2024. Catatan: * Data Sementara

2.11 PERJANJIAN KINERJA (TAHUN 2024)

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar dari rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024 yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target serta besaran anggaran program/kegiatan strategis SKPD pada tahun anggaran bersangkutan yang dapat dijadikan sebagai salah satu *tools* bagi *stakeholder* (pimpinan, penilai akuntabilitas dan masyarakat) untuk melakukan supervisi yang diperlukan serta dalam rangka melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja instansi Pemerintah dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pejabat suatu instansi Pemerintah. Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Lingkup DPD	Point BB (79)
Meningkatnya Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen

Sumber: Subbag Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024

Tabel 2.8 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Lingkup DPD	Point BB (79)
Meningkatnya Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen

Sumber: Subbag Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024

Untuk mencapai target Indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 hanya didukung oleh 2 (dua) program yang sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diperbaharui dengan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.115-5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.115-5-1317 Tahun 2023 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah dengan total anggaran pada APBD murni tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 121.461.739.144,-. Anggaran pada perjanjian kinerja tersebut dirubah pada DPA Perubahan sehingga menjadi Rp. 130.077.038.339. Rincian anggaran untuk melaksanakan perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel 2.8 di bawah.

Tabel 2.9 Anggaran Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024		
PROGRAM	ANGGARAN PK	ANGGARAN DPA PERUBAHAN
1	2	3
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	71.939.517.284	74.219.854.919
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	49.522.221.860	55.857.183.420
Total	121.461.739.144	130.077.038.339

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka perwujudan dari akuntabilitas kinerja dan alokasi anggaran yang disediakan, maka pengukuran kinerja ini menggambarkan pencapaian atas sasaran strategis yang didasarkan pada indikator kinerja yang targetnya sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Sasaran Strategis yang mengukur “Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD” pada periode Renstra Setwan Provinsi NTB Tahun 2019-2023 maka pada periode Renstra Setwan Provinsi NTB Tahun 2024-2026 telah menjadi Tujuan pada Renstra Setwan Provinsi NTB.

Sesuai Cascade Kinerja, Sekretariat DPRD Provinsi Nus Tenggara Barat dalam mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah **“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik”**.

Terkait hal tersebut **TUJUAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB TAHUN 2024-2026** adalah: **“Terwujudnya Layanan Kesekretariatan DPRD yang Berkualitas Melalui Pengelolaan Kelembagaan”** dengan indikator **“Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD”** menggunakan survei yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei dilakukan pada akhir tahun 2024, dengan menggunakan kuisioner yang dibagikan ke seluruh anggota DPRD yang berjumlah 65 orang.

Kuisioner yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap 14 unsur pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD sebagai berikut:

1. Kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan administrasi persidangan (materi rapat, jadwal kegiatan, undangan, daftar hadir)
2. Kemudahan mendapatkan layanan dukungan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Anggota DPRD.
3. Kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan pendampingan kegiatan reses.
4. Kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan kegiatan workshop Anggota DPRD.

5. Kecepatan SDM Sekretariat DPRD dalam merespons pengaduan, saran, dan masukan Anggota DPRD terhadap layanan persidangan dan AKD.
6. Kualitas dan kuantitas kendaraan yang disediakan Sekretariat DPRD
7. Kelengkapan, kenyamanan, dan kebersihan layanan ruang rapat paripurna dan ruang rapat AKD
8. Kualitas dan kuantitas publikasi kegiatan DPRD di media cetak dan elektronik.
9. Kecepatan SDM Sekretariat DPRD dalam merespons pengaduan, saran, dan masukan Anggota DPRD terhadap keluhan layanan penyediaan sarana dan prasarana.
10. Kecepatan dan ketepatan Sekretariat DPRD dalam memberikan layanan Administrasi Keuangan terkait kegiatan Reses anggota DPRD.
11. Kecepatan dan ketepatan Sekretariat DPRD dalam memberikan layanan Administrasi Keuangan terkait kegiatan Perjalanan Dinas anggota DPRD.
12. Kecepatan dan ketepatan Sekretariat DPRD dalam memberikan layanan Administrasi Keuangan terkait penyelesaian temuan Inspektorat, Irjen dan BPK.
13. Ketepatan dan kecukupan anggaran dalam mendukung kegiatan anggota DPRD.
14. Kecepatan SDM Sekretariat DPRD dalam merespons pengaduan, saran, dan masukan Anggota DPRD terhadap layanan Administrasi Keuangan.

Setiap pernyataan diberikan pilihan jawaban yang mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kepuasan pelayanan dimulai dari sangat tidak puas sampai dengan sangat puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori yaitu :

- 1) Sangat tidak puas , diberi nilai 1;
- 2) Tidak puas, diberi nilai 2;
- 3) Puas, diberi nilai 3;
- 4) Sangat puas, diberi nilai 4.

Interpretasi hasil survei kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD diperoleh berdasarkan rentang kriteria dapat dilihat pada tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1 Interpretasi Hasil Survei

NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	KINERJA PELAYANAN
1	2	3
1,00-2,5996	25,00-64,99	Tidak baik
2,60-3,064	65,00-76,60	Kurang baik
3,0644-3,532	76,61-88,30	Baik
3,5324-4,00	88,31-100,00	Sangat Baik

Adapun Sasaran Strategis Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 ada dua (2) yaitu:

1. **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”,** dengan Indikator **Nilai Sakip Lingkup DPD.**
2. **“Meningkatnya Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD”,** dengan Indikator **Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.**

SASARAN STRATEGIS 1 SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB TAHUN 2024-2026:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah antara lain:

- penilaian kualitas **perencanaan kinerja** yang memenuhi standar yang baik dan dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- penilaian **pengukuran kinerja** berjenjang dan berkelanjutan yang menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam pencapaian kinerja;
- penilaian **pelaporan kinerja** yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- penilaian **evaluasi akuntabilitas kinerja internal** yang memberikan hasil nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.
- pencapaian **Sasaran/kinerja Organisasi** (tindak lanjut dan komitmen).

SASARAN STRATEGIS 2 SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB TAHUN 2024-2026:

Tabel 3.1.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					PROYEKSI 2025 *	CATATAN ANALISIS
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TUJUAN: Terwujudnya layanan kesekretariatan DPRD yang berkualitas Melalui Pengelolaan Kelembagaan	Tingkat Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
	SASARAN 1: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Lingkup OPD	Nilai/Point	Nilai BB	Nilai BB	Nilai BB	Nilai BB	Nilai BB	Nilai BB	Nilai BB	Nilai BB	Nilai BB (73.09)	Nilai BB (72.05)	Nilai BB	
	SASARAN 2: Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
1		Rancangan Peraturan Daerah Yang Dibahas dan Disetujui	Perda	16	16	12	12	12	14	11	16	8	12	12	

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	SATU AN	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					PROY EKSI 2025 *	CATAT AN ANALI SIS
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2		Kegiatan Hearing/Dialog Pimpinan Dan Anggota DPRD Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Yang Difasilitasi	Kali/Orang	480	120	48	480	480	540	60	1.077	925	895	480	
3		Rapat Alat Kelengkapan Dewan Yang Difasilitasi	Kali	252	480	480	480	225	268	540	192	207	193	480	
4		Rapat Paripurna Yang Difasilitasi	Kali	48	252	48	48	46	46	268	40	42	39	46	
5		Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Difasilitasi	Kali	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	
6		Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang Difasilitasi	Kali/Orang	28	2860	2860	2860	1950	28	2898	4918	3182	5.395	2860	
7		Kegiatan Peningkatan Kapasitas (Bintek/Workshop) Yang Diikuti Oleh Pimpinan dan Anggota DPRD	Kali/Orang	3	65	65	65	65	3	65	65	65	130	65	
8		Publikasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Difasilitasi	Keg/Kali	32	32	36	36	36	39	53	53	68	34	36	

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2024

Tabel 3.1.2 Pencapaian Kinerja Cakupan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

INDIKATOR	URAIAN FASILITASI KEGIATAN DAN PELAYANAN DALAM 1 TAHUN	JUMLAH	SATUAN
1	2	3	4
Cakupan fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Formulasi Pengukuran: Jumlah Fasilitas Kegiatan dan Pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB. Sumber Data: Data Internal Sekretariat DPRD NTB	1. Fasilitas kegiatan hearing	895	Kali/orang
	2. Fasilitas kunjungan kerja DPRD Povinsi NTB	5.395	Kali/orang
	3. Fasilitas kegiatan rapat paripurna	39	Kali
	4. Fasilitas kegiatan rapat alat kelengkapan dewan (AKD)	193	Kali
	5. Fasilitas kegiatan rancangan perda yang telah dibahas dan disahkan	12	Buah
	6. Fasilitas kegiatan Reses DPRD Provinsi NTB	2	Kali
	7. Fasilitas kegiatan Bimtek/Workshop DPRD Provinsi NTB	130	Kali/orang
	8. Fasilitas publikasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	34	Keg/kali
	Jumlah jenis pelaksanaan tugas pokok DPRD Provinsi NTB yang difasilitasi	8	Jenis
	Cakupan Fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi NTB	100	Persen

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2024

3.2 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Pencapaian kinerja sasaran strategis tidak terlepas dari anggaran yang tersedia untuk merealisasikan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen perjanjian kinerja Sekretariat DPRD NTB Tahun 2024 yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur kinerja dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki Sekretariat DPRD NTB tahun 2024,

LKJIP SETWAN TAHUN 2024

sehingga dapat menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD NTB secara realistis yang dihubungkan dengan anggaran yang tersedia. Hasil survei tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD NTB merupakan capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB pada tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel 3.2 dan 3.3 dibawah ini:

Tabel 3.2 Capaian Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Lingkup OPD	Point BB (79)	Point BB 72,05	91,20%
Meningkatnya Cakupan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen	100 Persen	100%

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024

3.3 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN 2025 DAN TAHUN TERAKHIR (2026)

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

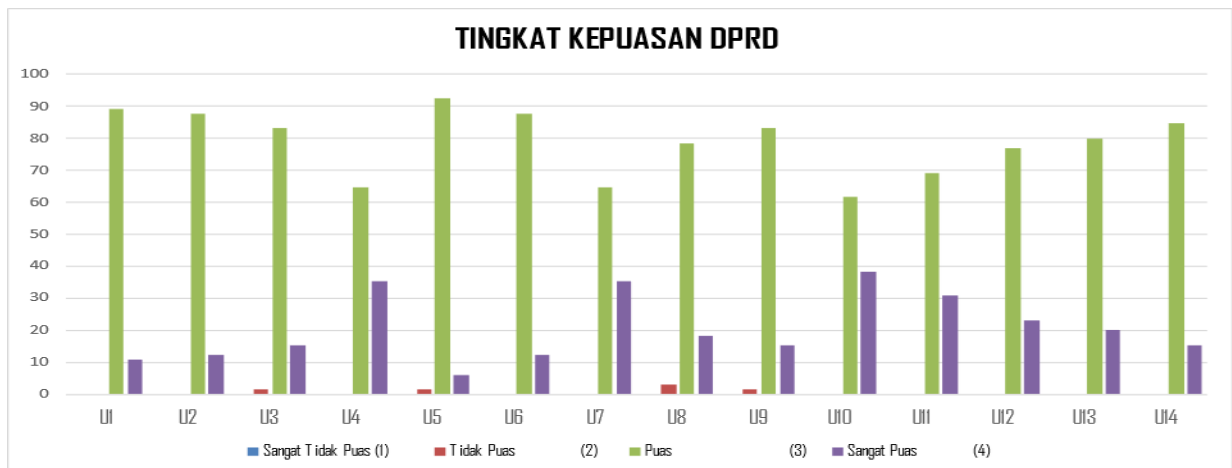
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TAHUN 2023		TAHUN 2024		PROYEKSI TAHUN 2025		TAHUN 2026	CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Lingkup OPD	Point BB 77	Point BB 73,09	Point BB 79	Point BB 72,05	Point A 82	Point A 82*	Point A 85	91,20%
Meningkatnya Cakupan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen*	100 Persen	100 Persen

*Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024, Catatan *: Angka Sementara*

3.4 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH DALAM RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB TAHUN 2024-2026

A. CAPAIAN KINERJA TUJUAN PADA SEKRETARIAT DPRD NTB, Terwujudnya Layanan Kesekretariatan DPRD yang Berkualitas Melalui Pengelolaan Kelembagaan dengan indikator Tingkat Kepuasan DPRD Terhadap pelayanan Sekretariat DPRD, berdasarkan hasil survey tahun 2024 masuk kategori B (baik). Adapun hasil survei tersebut berdasarkan perhitungan skor kepuasan. Penilaian kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD menunjukkan skor kepuasan 3,20 Skala Likert, apabila dihitung dengan rentang kriteria diperoleh hasil sebesar 80,03 persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa **“Tingkat Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD”** termasuk dalam **kategori B (baik)**. Hasil survei penilaian kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD NTB tahun 2024 termasuk dalam kategori B (baik), apabila dibandingkan dengan target Rencana Strategis pada tahun 2024 yaitu kategori B (baik), maka capaian target rencana strategis untuk tahun 2024 yaitu 100 persen.

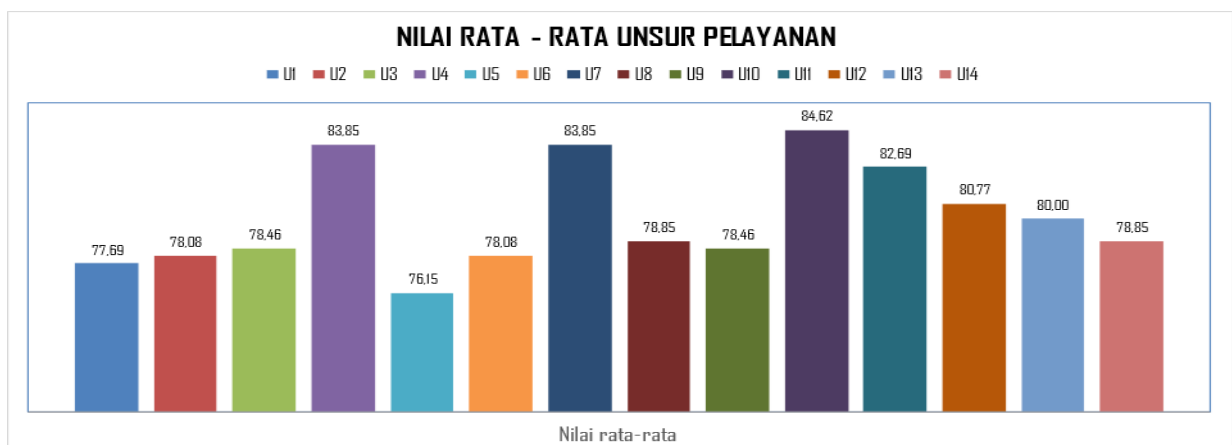
Rincian hasil survei terhadap 14 unsur pelayanan, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Kepuasan responden terhadap 14 unsur pelayanan Sekretariat DPRD

1. Kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan administrasi persidangan (materi rapat, jadwal kegiatan, undangan, daftar hadir)

Penilaian mengenai kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan administrasi persidangan (materi rapat, jadwal kegiatan, undangan, daftar hadir) dalam memberikan dukungan layanan kepada pimpinan dan anggota DPRD menunjukkan bahwa mayoritas menyatakan puas. Dari 65 responden yang menyatakan puas sebanyak 58 responden atau 89,23 persen dan yang menyatakan sangat puas sebanyak 7 responden atau 10,77 persen. Sementara responden yang menyatakan tidak puas dan yang menyatakan sangat tidak puas tidak ada responden. U1 menunjukkan skor kepuasan 3,11 Skala Likert.



Gambar 3.2 Nilai rata-rata kepuasan responden terhadap 14 unsur pelayanan Sekretariat DPRD

2. Kemudahan mendapatkan layanan dukungan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Anggota DPRD.

Hasil survei terhadap unsur kemudahan mendapatkan layanan dukungan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Anggota DPRD dalam memberikan dukungan layanan kepada pimpinan dan anggota DPRD menunjukkan bahwa mayoritas

menyatakan puas. Dari 65 responden yang menyatakan puas sebanyak 57 responden atau 87,69 persen dan yang menyatakan sangat puas sebanyak 8 responden atau 12,30 persen. Sementara responden yang menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas tidak ada. U2 menunjukkan skor kepuasan 3,12 Skala Likert.

3. Kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan pendampingan kegiatan reses.

Penilaian terhadap kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan pendampingan kegiatan reses dalam memberikan dukungan layanan kepada pimpinan dan anggota DPRD menunjukkan bahwa mayoritas menyatakan puas. Dari 65 responden, yang menyatakan puas sebanyak 54 responden atau 83,07 persen dan yang menyatakan sangat puas sebanyak 10 responden atau 15,38 persen. Sementara responden yang menyatakan tidak puas sebanyak 1 responden. U3 menunjukkan skor kepuasan 3,14 Skala Likert.

4. Kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan kegiatan workshop Anggota DPRD

Penilaian terhadap kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan kegiatan workshop Anggota DPRD dalam memberikan dukungan layanan kepada pimpinan dan anggota DPRD menunjukkan bahwa mayoritas menyatakan puas. Dari 65 responden, yang menyatakan puas sebanyak 42 responden atau 64,61 persen dan yang menyatakan sangat puas sebanyak 23 responden atau 35,38 persen. Sementara responden yang menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas, tidak ada responden. U4 menunjukkan skor kepuasan 3,35 Skala Likert.

5. Kecepatan SDM Sekretariat DPRD NTB dalam merespons pengaduan, saran, dan masukan Anggota DPRD terhadap layanan persidangan dan AKD.

Penilaian terhadap kecepatan SDM Sekretariat DPRD dalam merespons pengaduan, saran, dan masukan Anggota DPRD terhadap layanan persidangan dan AKD dalam memberikan dukungan layanan kepada pimpinan dan anggota DPRD menunjukkan bahwa mayoritas menyatakan puas. Dari 65 responden, yang menyatakan puas sebanyak 60 responden atau 92,30 persen dan yang menyatakan sangat puas sebanyak 4 responden atau 6,15 persen. Sementara responden yang menyatakan tidak puas sebanyak 1 responden atau 1,53 persen. U5 menunjukkan skor kepuasan 3,05 Skala Likert.

6. Kualitas dan kuantitas kendaraan yang disediakan Sekretariat DPRD NTB Penilaian terhadap kualitas dan kuantitas kendaraan yang disediakan Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan layanan kepada pimpinan dan anggota DPRD menunjukkan bahwa mayoritas menyatakan puas. Dari 65 responden, yang menyatakan puas sebanyak 57 responden atau 87,69 persen dan yang menyatakan sangat puas sebanyak 8 responden atau 12,30

persen. Sementara responden yang menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas tidak ada responden. U6 menunjukkan skor kepuasan 3,12 Skala Likert.

7. Kelengkapan, kenyamanan, dan kebersihan layanan ruang rapat paripurna dan ruang rapat AKD.

Penilaian terhadap unsur kelengkapan, kenyamanan, dan kebersihan layanan ruang rapat paripurna dan ruang rapat AKD dalam memberikan dukungan layanan kepada pimpinan dan anggota DPRD menunjukkan bahwa mayoritas menyatakan puas. Dari 65 responden, yang menyatakan puas sebanyak 42 responden atau 64,61 persen dan yang menyatakan sangat puas sebanyak 23 responden atau 35,38 persen. Sementara responden yang menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas tidak ada. U7 menunjukkan skor kepuasan 3,35 Skala Likert.

8. Kualitas dan kuantitas publikasi kegiatan DPRD di media cetak dan elektronik.

Penilaian terhadap unsur kualitas dan kuantitas publikasi kegiatan DPRD di media cetak dan elektronik dalam memberikan dukungan layanan kepada pimpinan dan anggota DPRD menunjukkan bahwa mayoritas menyatakan puas. Dari 64 responden, yang menyatakan puas sebanyak 51 responden atau 78,46 persen dan yang menyatakan sangat puas sebanyak 12 responden atau 18,46 persen. Sementara responden yang menyatakan tidak puas sebanyak 2 responden atau 3,07 persen dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak puas. U8 menunjukkan skor kepuasan 3,15 Skala Likert.

9. Kecepatan SDM Sekretariat DPRD NTB dalam merespons pengaduan, saran, dan masukan Anggota DPRD terhadap keluhan layanan penyediaan sarana dan prasarana.

Penilaian terhadap unsur kecepatan SDM Sekretariat DPRD dalam merespons pengaduan, saran, dan masukan Anggota DPRD terhadap keluhan layanan penyediaan sarana dan prasarana dalam memberikan dukungan layanan kepada pimpinan dan anggota DPRD menunjukkan bahwa mayoritas menyatakan puas. Dari 65 responden, yang menyatakan puas sebanyak 54 responden atau 83,07 persen dan yang menyatakan sangat puas sebanyak 10 responden atau 15,38 persen. Sementara responden yang menyatakan tidak puas sebanyak 1 responden atau 1,53 persen dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak puas. U9 menunjukkan skor kepuasan 3,14 Skala Likert.

10. Kecepatan dan ketepatan Sekretariat DPRD NTB dalam memberikan layanan Administrasi Keuangan terkait kegiatan Reses anggota DPRD.

Penilaian terhadap unsur kecepatan dan ketepatan Sekretariat DPRD dalam memberikan layanan administrasi keuangan terkait kegiatan Reses anggota DPRD dalam memberikan dukungan layanan kepada pimpinan dan

anggota DPRD menunjukkan bahwa mayoritas menyatakan puas. Dari 65 responden, yang menyatakan puas sebanyak 40 responden atau 61,53 persen dan yang menyatakan sangat puas sebanyak 25 responden atau 38,46 persen. Sementara responden yang menyatakan tidak puas dan yang menyatakan sangat tidak puas tidak ada responden. U10 menunjukkan skor kepuasan 3,38 Skala Likert.

11. Kecepatan dan ketepatan Sekretariat DPRD NTB dalam memberikan layanan Administrasi Keuangan terkait kegiatan Perjalanan Dinas anggota DPRD.

Penilaian terhadap unsur kecepatan dan ketepatan Sekretariat DPRD dalam memberikan layanan administrasi keuangan terkait kegiatan perjalanan dinas anggota DPRD dalam memberikan dukungan layanan kepada pimpinan dan anggota DPRD menunjukkan bahwa mayoritas menyatakan puas. Dari 65 responden, yang menyatakan puas sebanyak 45 responden atau 69,23 persen dan yang menyatakan sangat puas sebanyak 20 responden atau 30,76 persen. Sementara responden yang menyatakan tidak puas dan yang menyatakan sangat tidak puas tidak ada responden. U11 menunjukkan skor kepuasan 3,31 Skala Likert.

12. Kecepatan dan ketepatan Sekretariat DPRD NTB dalam memberikan layanan Administrasi Keuangan terkait penyelesaian temuan Inspektorat, Irjen dan BPK.

Penilaian terhadap unsur kecepatan dan ketepatan Sekretariat DPRD dalam memberikan layanan administrasi keuangan terkait penyelesaian temuan Inspektorat, Irjen dan BPK dalam memberikan dukungan layanan kepada pimpinan dan anggota DPRD menunjukkan bahwa mayoritas menyatakan puas. Dari 65 responden, yang menyatakan puas sebanyak 50 responden atau 76,92 persen dan yang menyatakan sangat puas sebanyak 15 responden atau 23,07 persen. Sementara responden yang menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas tidak ada responden. U12 menunjukkan skor kepuasan 3,23 Skala Likert.

13. Ketepatan dan kecukupan anggaran dalam mendukung kegiatan anggota DPRD.

Penilaian terhadap unsur ketepatan dan kecukupan anggaran dalam mendukung kegiatan anggota DPRD dalam memberikan dukungan layanan kepada pimpinan dan anggota DPRD menunjukkan bahwa mayoritas menyatakan puas. Dari 65 responden, yang menyatakan puas sebanyak 52 responden atau 80,00 persen dan yang menyatakan sangat puas sebanyak 13 responden atau 20,00 persen. Sementara responden yang menyatakan tidak puas dan yang menyatakan sangat tidak puas tidak ada responden. U13 menunjukkan skor kepuasan 3,20 Skala Likert.

14. Kecepatan SDM Sekretariat DPRD NTB dalam merespons pengaduan, saran, dan masukan Anggota DPRD terhadap layanan Administrasi Keuangan.

Penilaian terhadap unsur kecepatan SDM Sekretariat DPRD dalam merespons pengaduan, saran, dan masukan Anggota DPRD terhadap layanan Administrasi Keuangan dalam memberikan dukungan layanan kepada pimpinan dan anggota DPRD menunjukkan bahwa mayoritas menyatakan puas. Dari 65 responden, yang menyatakan puas sebanyak 55 responden atau 84,61 persen dan yang menyatakan sangat puas sebanyak 10 responden atau 15,38 persen. Sementara responden yang menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas tidak ada responden. UI4 menunjukkan skor kepuasan 3,15 Skala Likert.

B. Adapun **TARGET DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN PADA SEKRETARIAT DPRD NTB PADA TAHUN 2024** dapat dilihat pada tabel 3.4 dan tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.4 Capaian Target Kinerja Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET PK		REALISASI PK		CAPAIAN TAHUN 2024 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)
			TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2024	TAHUN 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Lingkup OPD	91,20%	Point BB (79)	Point A (82)	Point BB 72,05	-	84,76	Point A (85)
Meningkatnya Cakupan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	100 Persen	100 Persen	100 Persen	-	100	100 Persen

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024

Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Cakupan fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

INDIKATOR	URAIAN FASILITASI KEGIATAN DAN PELAYANAN DALAM 1 TAHUN	JUMLAH	SATUAN
1	2	3	4
Cakupan fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Formulasi Pengukuran: Jumlah Fasilitas Kegiatan dan Pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB. Sumber Data: Data Internal Sekretariat DPRD NTB	1. Fasilitas kegiatan hearing	895	Kali/orang
	2. Fasilitas kunjungan kerja DPRD Povinsi NTB	5.395	Kali/orang
	3. Fasilitas kegiatan rapat paripurna	39	Kali
	4. Fasilitas kegiatan rapat alat kelengkapan dewan (AKD)	193	Kali
	5. Fasilitas kegiatan rancangan perda yang telah dibahas dan disahkan	12	Buah
	6. Fasilitas kegiatan Reses DPRD Provinsi NTB	2	Kali
	7. Fasilitas kegiatan Bimtek/Workshop DPRD Provinsi NTB	130	Kali/orang
	8. Fasilitas publikasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	34	Keg/kali
	Jumlah jenis pelaksanaan tugas pokok DPRD Provinsi NTB yang difasilitasi	8	Jenis
	Cakupan Fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi NTB	100	Persen

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2024

3.5 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN STANDART NASIONAL (TIDAK ADA)

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional. Pembangunan Daeah adalah upaya bersama yang terencana secara sistematis untuk peningkatan kualitas kehidupan dan merealisasikan seluruh potensi secara berkesinambungan.

Dengan kata lain, pada satu sisi prinsip desentralisasi menciptakan otonomi daerah (termasuk dalam konteks pembangunan). Pada sisi yang lain perlu dicapai keselarasan rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional, hubungan antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional. Keselarasan rencana pembangunan dapat dipahami sebagai tingkat sejauh mana rencana pembangunan dari unit/tingkat pemerintahan lebih rendah merupakan bagian integral (satu kesatuan) dari dan disusun mengacu pada rencana pembangunan dari unit/tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Dengan demikian, tingkat kontribusi Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/kota kepada pemerintahan pusat dapat diidentifikasi dalam rangka memastikan tujuan pembangunan nasional. Namun demikian Standar nasional realisasi kinerja untuk Sekretariat DPRD Provinsi NTB belum ada, maka belum dapat dilakukan proses pembandingannya.

3.6 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Unsur pendukung urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2024 menetapkan sasaran strategis yaitu : **"Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah"** dengan indikator: "Nilai Sakip Lingkup OPD" dan, **"Meningkatnya Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD"** dengan indikator: "Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD". Berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Target dan capaian indikator Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.6 Capaian Indikator Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan pada Sekretariat DPRD Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Sekretaris DPRD dengan Gubernur) Tahun 2024

NO	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		CAPAIAN
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	Nilai Sakip Lingkup OPD	Nilai 88 (79)	Nilai 88 (72,05)	Nilai A (82)	-	Nilai A (85)	-	91,20%
2	Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	100%	100%	-	100%	-	100%

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2024

Dalam upaya mewujudkan capaian kinerja indikator dan melaksanakan seluruh program, kegiatan, subkegiatan sesuai dengan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun Anggaran Tahun 2024 Sekretariat DPRD Provinsi NTB telah berhasil merealisasikan Anggaran Tahun 2024 Sebesar Rp. 130.077.038.339,- sampai dengan Bulan Desember 2024 telah terealisasi sebesar Rp. 120.568.582.054,- dengan sisa anggaran sebesar Rp. 9.508.456.285 (7,31%). Realisasi keuangan program dan kegiatan Tahun 2024 adalah rata-rata sebesar 92,69%, dan realisasi fisik rata-rata 96,40%. Realisasi berdasarkan program yang dilaksanakan sebagai berikut:

- i. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp.70.568.136.612,- (95,08%).
- ii. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD Rp.50.000.445.442,- (89,51%).

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor-faktor yang menunjang keberhasilan kegiatan Sekretariat DPRD Prov. Nusa Tenggara Barat adalah :

- i. Eksistensi lembaga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bagian integral dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan penghubung antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Legislatif sebagai penentu kebijakan akan senantiasa dipertahankan.
- ii. Tersedianya anggaran yang cukup memadai.
- iii. Tersedianya Tata Tertib DPRD Provinsi NTB berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTB.
- iv. Dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- v. Ketersediaan Sumber daya Aparatur yang cukup dari segi kuantitas.
- vi. Terjalinnya hubungan baik (harmonis) antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- vii. Komitmen DPRD untuk mendukung Kebijakan Pemerintah Daerah.
- viii. Adanya Komitmen Pimpinan Sekretariat DPRD untuk mendukung adanya peningkatan kapasitas ASN maupun DPRD.
- ix. Pemanfaatan Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar dalam rangka mendukung kinerja DPRD.
- x. Penggunaan Teknologi Informasi yang semakin berkembang.
- xi. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD.
- xii. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis.
- xiii. Tingginya Antusiasme dan Aspirasi Masyarakat dalam mendukung kebijakan Pemerintah yang diserap melalui kegiatan hearing dan reses.
- xiv. Adanya Dukungan dari Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan kegiatan Diklat dan peningkatan kapasitas.

Beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB adalah perencanaan dan penganggaran pada tahun 2024 berada pada masa transisi periode legislatif dan pileg serentak sehingga menyebabkan banyaknya Raperda Raperda yang tidak dibahas dengan pembahasan yang tidak maksimal, banyak pula kegiatan yang dipersingkat waktu pembahasannya sehingga berimbas pada menurunnya realisasi kegiatan rapat pembahasan, berkurangnya kegiatan makan minum rapat, menurunnya kegiatan kunjungan kerja, konsultasi dan

koordinasi serta kegiatan lainnya, terutama nampak pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang hanya tercapai 62,19% dari target 100%, pada kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD hanya tercapai 61,62% dari target 100%, pada kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang hanya tercapai 45,21% dari target 100% dan pada kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang hanya tercapai 32,37% dari target 100%. Selain karena alasan yang tersebut diatas, juga adanya upaya efisiensi anggaran yang dilakukan unit atau bagian Sekretariat DPRD, permasalahan lainnya adalah:

- i. Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan perundangan.
- ii. Tingginya frekuensi kerja insidentil.
- iii. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan DPRD.
- iv. Cepatnya perubahan instrument penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat.
- v. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan.
- vi. Regulasi terkait pelaksanaan tupoksi masih berubah ubah.
- vii. Dinamika politik yang selalu berubah mempengaruhi pelaksanaan pelaksanaan tugas fungsi sekretariat DPRD.
- viii. Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas Kedewanan secara berkesinambungan.

Solusi dan langkah langkah kinerja yang akan dan telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan mengatasi kegagalan atau penurunan kinerja, sebagai berikut:

- i. Penataan kembali Struktur Organisasi kelembagaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB agar ada kesesuaian antara tugas fungsi dengan bagian lainnya.
- ii. Pengelolaan SDM, Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur.
- iii. Dukungan dan Komitmen Organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur Sekretariat DPRD dalam upaya peningkatan kinerja lembaga legislative.

Realisasi program, kegiatan, subkegiatan sesuai dengan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun Anggaran Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7 Realisasi Fisik dan Keuangan pada Sekretariat DPRD Tahun 2024

NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI s/d DESEMBER 2024			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
		(Rp.)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		130.077.038.339	120.568.582.054	92,69	96,40	9.508.456.285

NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI s/d DESEMBER 2024			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(%)	(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
DPRD DAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB	Nilai SAKIP Lingkup OPD (nilai/point)	74.219.854.919	70.568.136.612	95,08	98,80	3.651.718.307
	Cakupan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (persentase)	55.857.183.420	50.000.445.442	89,51	94,00	5.856.737.978
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Lingkup OPD	74.219.854.919	70.568.136.612	95,08	98,80	3.651.718.307
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	576.441.700	430.922.620	74,76	100,00	145.519.080
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	186.337.900	129.618.720	69,56	100,00	56.719.180
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	83.834.100	50.607.300	60,37	100,00	33.226.800
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	93.733.600	78.726.500	83,99	100,00	15.007.100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	13.048.300	11.433.600	87,63	100,00	1.614.700
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	30.184.000	20.901.000	69,25	100,00	9.283.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.292.400	32.554.500	80,80	100,00	7.737.900
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	129.011.400	107.081.000	83,00	100,00	21.930.400
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.930.918.043	13.745.761.912	92,06	100,00	1.185.156.131
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14.359.262.193	13.197.023.742	91,91	100,00	1.162.238.451
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	316.083.600	297.732.920	94,19	100,00	18.350.680
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	223.923.250	221.629.850	98,98	100,00	2.293.400
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.173.600	27.900.000	92,46	100,00	2.273.600
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1.475.400	1.475.400	100,00	100,00	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	37.962.000	23.610.000	62,19	95,00	14.352.000

NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI s/d DESEMBER 2024			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(%)	(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.531.000	-	-	-	3.531.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.521.000	2.880.000	63,70	100,00	1.641.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	29.910.000	20.730.000	69,31	100,00	9.180.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	1.460.323.700	1.308.665.100	89,61	93,00	151.658.600
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	470.250.000	410.255.000	87,24	100,00	59.995.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	750.604.500	750.501.500	99,99	100,00	103.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	39.959.200	36.908.600	92,37	100,00	3.050.600
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22.000.000	-	-	-	22.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	177.510.000	111.000.000	62,53	100,00	66.510.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	5.764.775.050	5.253.371.610	91,13	100,00	511.403.440
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	72.680.000	72.680.000	100,00	100,00	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	629.229.650	581.734.650	92,45	100,00	47.495.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	267.240.300	243.419.115	91,09	100,00	23.821.185
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	102.788.000	99.530.000	96,83	100,00	3.258.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	170.680.000	165.950.000	97,23	100,00	4.730.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.631.100.000	2.394.864.445	91,02	100,00	236.235.555
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.791.595.000	1.616.900.000	90,25	100,00	174.695.000
Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	24.796.100	24.744.400	99,79	100,00	51.700
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	74.666.000	53.549.000	71,72	100,00	21.117.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	537.529.660	473.050.000	88,00	100,00	64.479.660
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	355.264.660	332.950.000	93,72	100,00	22.314.660

NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI s/d DESEMBER 2024			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
		(Rp.)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	182.265.000	140.100.000	76,87	100,00	42.165.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	6.252.769.520	5.837.591.273	93,36	100,00	415.178.247
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	78.849.000	50.194.000	63,66	100,00	28.655.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	964.000.000	800.260.353	83,01	100,00	163.739.647
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5.209.920.520	4.987.136.920	95,72	100,00	222.783.600
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	2.058.082.000	1.865.334.243	90,63	100,00	192.747.757
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	167.600.000	121.024.999	72,21	100,00	46.575.001
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	730.470.000	666.007.534	91,18	100,00	64.462.466
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	17.500.000	9.250.000	52,86	100,00	8.250.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	355.446.000	310.892.750	87,47	100,00	44.553.250
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	35.000.000	7.404.460	21,16	100,00	27.595.540
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	752.066.000	750.754.500	99,83	100,00	1.311.500
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah jenis layanan administrasi DPRD	41.721.238.426	40.939.513.729	98,13	100,00	781.724.697
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	41.113.488.426	40.333.713.729	98,10	100,00	779.774.697
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	607.750.000	605.800.000	99,68	100,00	1.950.000
Layanan Administrasi DPRD	Jumlah jenis layanan administrasi DPRD	879.814.820	690.316.125	78,46	100,00	189.498.695
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	311.184.220	188.975.020	60,73	100,00	122.209.200
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	148.630.600	135.552.600	91,20	100,00	13.078.000
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	420.000.000	365.788.505	87,09	100,00	54.211.495

NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI s/d DESEMBER 2024			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(%)	(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	55.857.183.420	50.000.445.442	89,51	94,00	5.856.737.978
Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	1.541.334.500	949.778.700	61,62	95,00	591.555.800
Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	293.218.500	132.729.700	45,27	100,00	160.488.800
Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1.213.336.000	817.049.000	67,34	100,00	396.287.000
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	34.780.000	-	-	-	34.780.000
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	654.466.200	436.334.500	66,67	100,00	218.131.700
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	92.966.200	68.745.500	73,95	100,00	24.220.700
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	92.609.000	57.048.000	61,60	100,00	35.561.000
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	142.801.000	78.613.000	55,05	100,00	64.188.000
Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	203.509.000	118.833.000	58,39	100,00	84.676.000
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	122.581.000	113.095.000	92,26	100,00	9.486.000
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	608.583.570	196.990.520	32,37	100,00	411.593.050
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	125.118.500	30.509.450	24,38	100,00	94.609.050
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	118.123.170	49.089.570	41,56	100,00	69.033.600
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	130.477.330	40.547.630	31,08	100,00	89.929.700
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	118.123.170	42.330.170	35,84	100,00	75.793.000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	116.741.400	34.513.700	29,56	100,00	82.227.700
Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	4.690.744.800	4.037.838.168	86,08	98,00	652.906.632
Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan Orientasi DPRD	1.097.931.600	1.095.881.420	99,81	100,00	2.050.180
Bimbingan Teknis/Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	987.799.500	978.962.798	99,11	100,00	8.836.702
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	789.400.000	423.300.000	53,62	100,00	366.100.000
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	454.760.200	439.111.700	96,56	100,00	15.648.500

NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI s/d DESEMBER 2024			SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		FISIK	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(%)	(Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	25.500.000	17.450.000	68,43	100,00	8.050.000
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	14.298.500	-	-	-	14.298.500
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.321.055.000	1.083.132.250	81,99	100,00	237.922.750
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	26.640.116.150	25.005.044.586	93,86	100,00	1.635.071.564
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	8.753.600.000	7.397.851.048	84,51	100,00	1.355.748.952
Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	64.555.000	43.715.000	67,72	100,00	20.840.000
Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	17.821.961.150	17.563.478.538	98,55	100,00	258.482.612
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	68.953.800	31.176.200	45,21	100,00	37.777.600
Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	39.861.400	22.450.000	56,32	100,00	17.411.400
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	29.092.400	8.726.200	29,99	100,00	20.366.200
Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah jenis fasilitasi tugas DPRD	21.652.984.400	19.343.282.768	89,33	100,00	2.309.701.632
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	20.654.400.000	18.601.896.568	90,06	100,00	2.052.503.432
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	78.556.500	63.231.500	80,49	100,00	15.325.000
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	920.027.900	678.154.700	73,71	100,00	241.873.200

Sumber: Subbag Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024

3.7 ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sumber daya manusia merupakan sumber daya utama dalam menjalankan fungsi organisasi untuk mencapai tujuan (goal) yang diharapkan, karena manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang dapat membuat sumber daya lainnya bekerja dan berdampak langsung terhadap kinerja organisasi. Jumlah sumber daya manusia yang tersedia dapat menjadi tolok ukur tingkat pencapaian tujuan organisasi/instansi. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat DPRD Provinsi NTB sebanyak 119 ASN. Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB tersebut belumlah ideal jika memperhatikan peran dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTB dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTB selaku perangkat daerah yang memfasilitasi koordinasi antara pihak legislative dengan

eksekutif. Kuantitas dan Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Sekretariat DPRD Provinsi NTB perlu disesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi pelayanan terhadap kegiatan dan tugas tugas DPRD.

Dalam rangka menunjang keberlangsungan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang ada, Sekretariat DPRD Provinsi NTB melakukan beberapa efisiensi program/kegiatan/subkegiatan dan berdampak positif dalam efisiensi kinerja pelaksanaan penganggaran program kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi NTB, dimana anggarannya dapat dialihkan untuk memastikan keberlangsungan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan lainnya guna mendukung tercapainya kinerja. Sumber anggaran kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi NTB secara keseluruhan berasal dari APBD Provinsi NTB. Untuk mencapai target perjanjian kinerja yang telah ditentukan, anggaran yang dipergunakan sebesar 92,69% sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 7,31%. Sedangkan tingkat efektifitas penggunaan anggaran Sekretariat DPRD sebesar 7,31% yang dihitung dari realisasi anggaran sebesar 92,69% dibagi tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Tingkat efesiensi dan efektifitas kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan program yang dijalankan dapat dilihat pada tabel 3.8.

Efisiensi terhadap penggunaan sumberdaya termasuk efisiensi anggaran dalam pencapaian sasaran strategis adalah dengan melakukan perencanaan program kegiatan dan sub kegiatan yang selaras dengan Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi NTB tahun 2024-2026, dengan demikian sasaran strategis dapat sinkron dengan kegiatan yang ada pada Sekretariat DPRD. Berikut tabel efisiensi anggaran pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB pada tahun 2024.

Tabel 3.8 Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Sekretariat DPRD

KODE REK.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	RELEVANSI DENGAN SASARAN KINERJA	EFISIENSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SASARAN STRATEGIS:					130.077.038.339	120.568.582.054	92,69		7,31
	1. MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH*					74.219.854.919	70.568.136.612	95,08		4,92
	2. MENINGKATNYA CAKUPAN FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD									
	INDIKATOR:					55.857.183.420	50.000.445.442	89,51		10,49
	1. NILAI SAKIP LINGKUP DPD (NILAI/POINT)									
	2. CAKUPAN FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD (PERSENTASE)									
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai/Point	Nilai/Point BB (79)	Nilai BB (72,05)	91,2	74.219.854.919	70.568.136.612	95,08		4,92
4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	22	22	100	576.441.700	430.922.620	74,76		25,24
4.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100	186.337.900	129.618.720	69,56		30,44
4.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100	83.834.100	50.607.300	60,37		39,63
4.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100	93.733.600	78.726.500	83,99		16,01
4.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100	13.048.300	11.433.600	87,63		12,37
4.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100	30.184.000	20.901.000	69,25		30,75

KODE REK.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	RELEVANSI DENGAN SASARAN KINERJA	EFISIENSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100	40.292.400	32.554.500	80,80		19,20
4.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	16	16	100	129.011.400	107.081.000	83,00		17,00
4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	14.930.918.043	13.745.761.912	92,06		7,94
4.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Org/ Bulan	123	119	96,75	14.359.262.193	13.197.023.742	91,91		8,09
4.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	100	316.083.600	297.732.920	94,19		5,81
4.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	7500	11365	151,53	223.923.250	221.629.850	98,98		1,02
4.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100	30.173.600	27.900.000	92,46		7,54
4.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen	1	1	100	1.475.400	1.475.400	100,00		-
4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	37.962.000	23.610.000	62,19		37,81
4.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	2	100	3.531.000	-	-		100,00
4.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	100	4.521.000	2.880.000	63,70		36,30
4.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100	29.910.000	20.730.000	69,31		30,69
4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100	1.460.323.700	1.308.665.100	89,61		10,39
4.02.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	2	2	100	470.250.000	410.255.000	87,24		12,76
4.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Paket	1	1	100	750.604.500	750.501.500	99,99		0,01
4.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	100	39.959.200	36.908.600	92,37		7,63
4.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	4	0	0	22.000.000	-	-		100,00
4.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Org	20	20	100	177.510.000	111.000.000	62,53		37,47
4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	5.764.775.050	5.253.371.610	91,13		8,87
4.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1	100	72.680.000	72.680.000	100,00		-
4.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	1	1	100	629.229.650	581.734.650	92,45		7,55
4.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	1	1	100	267.240.300	243.419.115	91,09		8,91
4.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	1	1	100	102.788.000	99.530.000	96,83		3,17
4.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	7	7	100	170.680.000	165.950.000	97,23		2,77
4.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100	2.631.100.000	2.394.864.445			8,98

KODE REK.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	RELEVANSI DENGAN SASARAN KINERJA	EFISIENSI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
								91,02		
4.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	1	1	100	1.791.595.000	1.616.900.000	90,25		9,75
4.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis	Dokumen	1	1	100	24.796.100	24.744.400	99,79		0,21
4.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	100	74.666.000	53.549.000	71,72		28,28
4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	2	10	500	537.529.660	473.050.000	88,00		12,00
4.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Paket	1	1	100	355.264.660	332.950.000	93,72		6,28
4.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	12	12	100	182.265.000	140.100.000	76,87		23,13
4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	6.252.769.520	5.837.591.273	93,36		6,64
4.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	100	78.849.000	50.194.000	63,66		36,34
4.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Laporan	1	1	100	964.000.000	800.260.353	83,01		16,99
4.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1	1	100	5.209.920.520	4.987.136.920	95,72		4,28
4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	6	90	1500	2.058.082.000	1.865.334.243	90,63		9,37
4.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	4	4	100	167.600.000	121.024.999	72,21		27,79
4.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	66	66	100	730.470.000	666.007.534	91,18		8,82
4.02.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Unit	6	6	100	17.500.000	9.250.000	52,86		47,14
4.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	10	10	100	355.446.000	310.892.750	87,47		12,53
4.02.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Unit	1	1	100	35.000.000	7.404.460	21,16		78,84
4.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	3	3	100	752.066.000	750.754.500	99,83		0,17
4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jenis Layanan	2	3	150	41.721.238.426	40.939.513.729	98,13		1,87
4.02.01.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Org/ Bulan	65	65	100	41.113.488.426	40.333.713.729	98,10		1,90
4.02.01.1.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Paket	2	2	100	607.750.000	605.800.000	99,68		0,32
4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	Jenis Layanan	3	4	133,3	879.814.820	690.316.125	78,46		21,54
4.02.01.1.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	1	1	100	311.184.220	188.975.020	60,73		39,27

KODE REK.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	RELEVANSI DENGAN SASARAN KINERJA	EFISIENSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02.01.1.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	1	1	100	148.630.600	135.552.600	91,20		8,80
4.02.01.1.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Paket	3	3	100	420.000.000	365.788.505	87,09		12,91
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persen	100	100	100	55.857.183.420	50.000.445.442	89,51		10,49
4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Perda dan Peraturan DPRD	9	12	133,3	1.541.334.500	949.778.700	61,62		38,38
4.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Dokumen	12	12	100	293.218.500	132.729.700	45,27		54,73
4.02.02.1.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Dokumen	1	1	100	1.213.336.000	817.049.000	67,34		32,66
4.02.02.1.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Dokumen	1	0	0	34.780.000	0	-		100,00
4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Laporan	5	5	100	654.466.200	436.334.500	66,67		33,33
4.02.02.1.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1	1	100	92.966.200	68.745.500	73,95		26,05
4.02.02.1.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1	1	100	92.609.000	57.048.000	61,60		38,40
4.02.02.1.02.03	Pembahasan APBD	Dokumen	1	1	100	142.801.000	78.613.000	55,05		44,95
4.02.02.1.02.04	Pembahasan Perubahan APBD	Dokumen	1	1	100	203.509.000	118.833.000	58,39		41,61
4.02.02.1.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1	1	100	122.581.000	113.095.000	92,26		7,74
4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	5	5	100	608.583.570	196.990.520	32,37		67,63
4.02.02.1.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	1	1	100	125.118.500	30.509.450	24,38		75,62
4.02.02.1.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	1	1	100	118.123.170	49.089.570	41,56		58,44
4.02.02.1.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	1	1	100	130.477.330	40.547.630	31,08		68,92
4.02.02.1.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	1	1	100	118.123.170	42.330.170	35,84		64,16
4.02.02.1.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	1	1	100	116.741.400	34.513.700	29,56		70,44
4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Orang	65	65	100	4.690.744.800	4.037.838.168	86,08		13,92
4.02.02.1.04.01	Orientasi DPRD	Dokumen	1	1	100	1.097.931.600	1.095.881.420	99,81		0,19
4.02.02.1.04.02	Bimbingan Teknis/Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	65	65	100	987.799.500	978.962.798	99,11		0,89
4.02.02.1.04.05	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	100	36	36	789.400.000	423.300.000	53,62		46,38
4.02.02.1.04.06	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Orang	9	9	100	454.760.200	439.111.700	96,56		3,44
4.02.02.1.04.07	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	1	1	100	25.500.000	17.450.000	68,43		31,57
4.02.02.1.04.08	Penyusunan Program Kerja DPRD	Dokumen	1	0	0	14.298.500	-	-		100,00
4.02.02.1.04.04	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen	1	1	100	1.321.055.000	1.083.132.250	81,99		18,01

KODE REK.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	RELEVANSI DENGAN SASARAN KINERJA	EFISIENSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Laporan	3	3	100	26.640.116.150	25.005.044.586	93,86		6,14
4.02.02.1.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Laporan	1	1	100	8.753.600.000	7.397.851.048	84,51		15,49
4.02.02.1.05.02	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Dokumen	2	2	100	64.555.000	43.715.000	67,72		32,28
4.02.02.1.05.03	Pelaksanaan Reses	Dokumen	3	2	66,67	17.821.961.150	17.563.478.538	98,55		1,45
4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	2	2	100	68.953.800	31.176.200	45,21		54,79
4.02.02.1.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Dokumen	1	1	100	39.861.400	22.450.000	56,32		43,68
4.02.02.1.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	1	1	100	29.092.400	8.726.200	29,99		70,01
4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jenis Fasilitasi	4	5	125	21.652.984.400	19.343.282.768	89,33		10,67
4.02.02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	1	1	100	20.654.400.000	18.601.896.568	90,06		9,94
4.02.02.1.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	1	1	100	78.556.500	63.231.500	80,49		19,51
4.02.02.1.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	1	1	100	920.027.900	678.154.700	73,71		26,29
TINGKAT EFISIENSI 7,31 %										
TINGKAT EFEKTIVITAS 92,69% ATAU EFEKTIF										

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024

3.8 Cross Cutting.

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB, kolaborasi (cross cutting) juga dilakukan dengan beberapa perangkat daerah/lembaga/stakeholder lainnya pada penyelenggaraan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan di Sekretariat DPRD Provinsi NTB. Cross cutting tersebut dapat dilihat pada tabel 3.9 dibawah ini:

Tabel 3.9 Tabel Cross Cutting Kegiatan, Sub Kegiatan pada Sekretariat DPRD NTB

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CROSSCUTTING	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Jumlah pembentukan Perda dan peraturan DPRD yang difasilitasi	Jumlah pembentukan Perda dan peraturan DPRD yang difasilitasi	Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Biro Hukum dan OPD Lingkup Provinsi NTB	
	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah program pembentukan perda (propemperda)	Sub Kegiatan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Biro Hukum dan OPD Lingkup Provinsi NTB	
	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Rancangan Perda yang dibahas	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda	Biro Hukum dan OPD Lingkup Provinsi NTB	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah naskah akademik	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Biro Hukum dan OPD Lingkup Provinsi NTB	
2	Meningkatnya Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	TAPD (Bappeda, BPKAD , Bappenda)	
	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah rapat pembahasan KUA dan PPAS	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	TAPD (Bappeda, BPKAD , Bappenda)	

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CROSSCUTTING	KET.
1	2	3	4	5	6
	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	<i>Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>	TAPD (Bappeda, BPKAD, Bappeda)	
	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah rapat Pembahasan APBD	<i>Sub Kegiatan Pembahasan APBD</i>	TAPD (Bappeda, BPKAD, Bappeda)	
	Terlaksananya Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah rapat Pembahasan Perubahan APBD	<i>Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan APBD</i>	TAPD (Bappeda, BPKAD, Bappeda)	
	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	<i>Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</i>	TAPD (Bappeda, BPKAD, Bappeda)	
3	Meningkatnya Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	46 OPD Lingkup Provinsi NTB	
	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	<i>Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum</i>	OPD Lingkup Provinsi NTB Mitra Komisi-1 DPRD NTB	
	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	<i>Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</i>	OPD Lingkup Provinsi NTB Mitra Komisi-4 DPRD NTB	
	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	<i>Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>	OPD Lingkup Provinsi NTB Mitra Komisi-5 DPRD NTB	
	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	<i>Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>	OPD Lingkup Provinsi NTB Mitra Komisi-2 dan 3 DPRD NTB	
	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	<i>Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam</i>	OPD Lingkup Provinsi NTB Mitra Komisi-4 DPRD NTB	
4	Meningkatnya Jumlah laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Masyarakat, Toga, Toma, Pemerintah Kabupaten dan Kota di NTB	
	Terlaksananya Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah laporan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD</i>	Bappeda dan OPD Lingkup Provinsi NTB	
	Terlaksananya Pelaksanaan Reses	Jumlah Reses	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses</i>	Masyarakat, Toga, Toma, Pemerintah Kabupaten dan Kota di NTB	

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2024

3.9 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Pelaksanaan fungsi penunjang yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD dalam rangka mendukung Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD), terutama pada **Tujuan ke-5 RPD, "Terwujudnya Peningkatan Tata kelola Pemerintahan Daerah"** dengan **Sasaran ke-8 "Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pola Pikir, Kelembagaan, Regulasi dan Perundang-undangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Ketatalaksanaan, Akuntabilitas, Pengawasan dan Pelayanan Publik"**. Sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan urusan Unsur pendukung urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2024, Sekretariat DPRD Provinsi NTB menetapkan sasaran strategis yaitu:

1. **"Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah"** dengan indikator kinerja "Nilai Sakip Lingkup DPD".
2. **"Meningkatnya Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD"** dengan indikator kinerja "Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD". Target dan capaian indikator kinerja tersebut pada tahun 2024 disajikan pada tabel 3.10 sebagai berikut.

Tabel 3.10 Capaian Indikator Urusan Bidang Administasi Pemerintahan pada Sekretariat DPRD Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Nilai Sakip Lingkup DPD					Point BB (79)	Point BB* (75,02)
2	Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD					100 Persen	100 Persen

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2025, Catatan: Angka Sementara Maret 2024

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTB dituangkan dalam 2 (dua) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 73 (tujuh puluh tiga) sub kegiatan. Realisasi keuangan program, kegiatan, sub kegiatan Tahun 2024 adalah rata-rata sebesar 92,69%, dan realisasi fisik rata-rata 96,40%. Sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi NTB, Sekretariat DPRD NTB tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPD NTB Tahun 2024-2026 sekaligus juga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretariat DPRD NTB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memerlukan dukungan dari berbagai unsur. Unsur tersebut tidak terlepas dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat DPRD Provinsi NTB. Faktor-faktor yang menunjang keberhasilan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi NTB adalah :

1. Eksistensi lembaga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bagian integral dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan penghubung antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Legislatif sebagai penentu kebijakan akan senantiasa dipertahankan.
2. Tersedianya anggaran yang cukup memadai.
3. Tersedianya Tata Tertib DPRD Provinsi NTB berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTB.

4. Dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5. Ketersediaan Sumber daya Aparatur yang cukup dari segi kuantitas.
6. Terjalannya hubungan baik (harmonis) antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota DPRD.
7. Komitmen DPRD untuk mendukung Kebijakan Pemerintah Daerah.
8. Adanya Komitmen Pimpinan Sekretariat DPRD untuk mendukung adanya peningkatan kapasitas ASN maupun DPRD.
9. Pemanfaatan Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar dalam rangka mendukung kinerja DPRD.
10. Penggunaan Teknologi Informasi yang semakin berkembang.
11. Terjalannya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD.
12. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis.
13. Tingginya Antusiasme dan Aspirasi Masyarakat dalam mendukung kebijakan Pemerintah yang diserap melalui kegiatan hearing dan reses.
14. Adanya Dukungan dari Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan kegiatan Diklat dan peningkatan kapasitas.

3.10 REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2024 pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Sekretariat DPRD Provinsi NTB dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebesar Rp. **130.077.038.339,-** dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. **120.568.582.054,-** (92,69%). Adapun rincian anggaran dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja setiap indikator pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.11 sebagai berikut:

Tabel 3.11 Target Anggaran yang telah ditetapkan dan Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			KEU (%)	FISIK (%)	EFISIENSI (%)
						URAIAN	TARGET	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TUJUAN: Terwujudnya Layanan Kesekretariatan DPRD yang Berkualitas Melalui Pengelolaan Kelembagaan	SASARAN 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah					130.077.038.339	120.568.582.054	92,69	96,40	7,31
		SASARAN 2: Meningkatnya Cakupan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD									
4.02.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			74.219.854.919	70.568.136.612	95,08	98,80	4,92
4.02.01.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	576.441.700	430.922.620	74,76	100,00	25,24
4.02.01.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.930.918.043	13.745.761.912	92,06	100,00	7,94
4.02.01.03					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	37.962.000	23.610.000	62,19	95,00	37,81
4.02.01.05					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	1.460.323.700	1.308.665.100	89,61	93,00	10,39
4.02.01.06					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	5.764.775.050	5.253.371.610	91,13	100,00	8,87

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			KEU (%)	FISIK (%)	EFISIENSI (%)
						URAIAN	TARGET	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.02.01.1.07					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	537.529.660	473.050.000	88,00	100,00	12,00
4.02.01.1.08					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	6.252.769.520	5.837.591.273	93,36	100,00	6,64
4.02.01.1.09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	2.058.082.000	1.865.334.243	90,63	100,00	9,37
4.02.01.1.15					Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Meningkatnya Jumlah jenis layanan keuangan DPRD	41.721.238.426	40.939.513.729	98,13	100,00	1,87
4.02.01.1.16					Layanan Administrasi DPRD	Meningkatnya Jumlah jenis layanan administrasi DPRD	879.814.820	690.316.125	78,46	100,00	21,54
4.02.02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			55.857.183.420	50.000.445.442	89,51	94,00	10,49
4.02.02.1.01					Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Meningkatnya Jumlah pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	1.541.334.500	949.778.700	61,62	95,00	38,38
4.02.02.1.02					Pembahasan Kebijakan Anggaran	Meningkatnya Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	654.466.200	436.334.500	66,67	100,00	33,33
4.02.02.1.03					Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	608.583.570	196.990.520	32,37	100,00	67,63
4.02.02.1.04					Peningkatan Kapasitas DPRD	Meningkatnya Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	4.690.744.800	4.037.838.168	86,08	98,00	13,92
4.02.02.1.05					Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Meningkatnya Jumlah laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	26.640.116.150	25.005.044.586	93,86	100,00	6,14

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			KEU (%)	FISIK (%)	EFISIENSI (%)
						URAIAN	TARGET	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.02.02.1.06					Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Meningkatnya Jumlah laporan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	68.953.800	31.176.200	45,21	100,00	54,79
4.02.02.1.08					Fasilitasi Tugas DPRD	Meningkatnya Jumlah jenis fasilitasi tugas DPRD	21.652.984.400	19.343.282.768	89,33	100,00	10,67
					TINGKAT EFISIENSI 7,31 %						
					TINGKAT EFEKTIFITAS 92,69% ATAU EFEKTIF						

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024

Sedangkan realisasi anggaran perjanjian kinerja indikator Sasaran Strategis pada tahun 2024 Sekretariat DPRD Provinsi NTB dapat dilihat pada tabel 3.12 sebagai berikut.

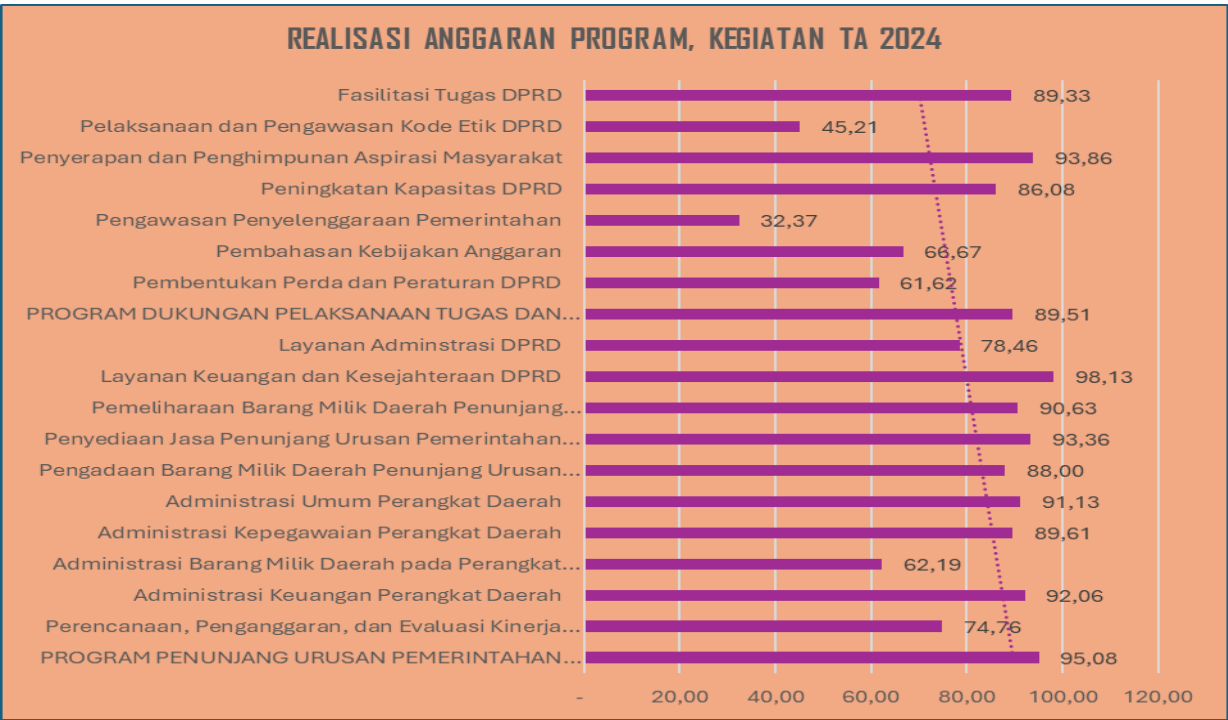
Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
1		2	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD		Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	
Anggaran PK Murni 2024	DPA Perubahan 2024	Realisasi Rp.	%
121.461.739.144	130.077.038.339	120.568.582.054	92,69%

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024

Selama Tahun Anggaran 2024, belanja yang dilaksanakan Sekretariat DPRD NTB terbagi menjadi 2 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Realisasi anggaran berdasarkan program yang dilakanakan dapat dilihat pada gambar 3.3:

Gambar 3.3 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Kegiatan Sekretariat DPRD NTB Tahun 2024



Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. LKjIP pada dasarnya menyajikan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan, sebagai tolok ukur kinerja yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Kinerja tahunan tersebut menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan Sekretariat DPRD Provinsi NTB dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA. LKjIP dapat dijadikan acuan yang sangat penting dalam upaya perbaikan untuk mencapai keberhasilan mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
2. Sekretariat DPRD Provinsi NTB pada tahun 2024 melaksanakan 2 (dua) Program, 17 Kegiatan dan 73 Sub Kegiatan, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 130.077.038.339,-. Dari hasil evaluasi kinerja pada Sekretariat DPRD NTB Realisasi Anggaran Sebesar Rp. 120.568.582.054,- untuk progress fisik mencapai 96,40% dan progress keuangan mencapai 92,69%. Dengan capaian progress fisik 96,40% menunjukkan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan selama tahun 2024 tidak mengalami hambatan berarti, meski demikian progress keuangan 92,69% terdapat sisa anggaran sebesar 7,31% hal ini disebabkan oleh:
 - a) Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2024 berada pada masa transisi periode legislatif dan pileg serentak sehingga menyebabkan banyaknya Raperda Raperda yang tidak dibahas dengan pembahasan yang maksimal, banyak pula kegiatan yang dipersingkat waktu pembahasannya sehingga berimbas pada menurunnya realisasi kegiatan rapat pembahasan, berkurangnya kegiatan makan minum rapat, menurunnya kegiatan kunjungan kerja, konsultasi dan koordinasi serta kegiatan lainnya, terutama nampak pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang hanya tercapai 62,19% dari target 100%, pada kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD hanya tercapai 61,62% dari target 100%, pada kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang hanya tercapai 45,21% dari target 100% dan pada kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang hanya tercapai 32,37% dari target 100%. Selain karena alasan yang tersebut diatas, juga adanya upaya efisiensi anggaran yang dilakukan unit atau bagian Sekretariat DPRD. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah NTB, Sekretariat DPRD NTB tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPD NTB Tahun 2024-2026.
 - b) Terdapat 4 Kegiatan yang dilaksanakan, yang realisasi anggarannya dibawah 65%, yakni pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang hanya tercapai 62,19% dari target 100%, pada kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD hanya tercapai 61,62% dari target 100%, pada kegiatan

Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang hanya tercapai 45,21% dari target 100% dan pada kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang hanya tercapai 32,37% dari target 100%, selain karena adanya upaya efisiensi anggaran yang dilakukan unit atau bagian Sekretariat DPRD NTB serta dinamika pembahasan anggaran yang terjadi antara TAPD dan Lembaga Legislatif juga mewarnai kegiatan tahun 2024.

Tabel 4.1 memperlihatkan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024.

Tabel 4.1 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024

NO	TUJUAN / SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN RINCIAN KEGIATAN	SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA			KONDISI AKHIR 2026	PROGRAM
			INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Terwujudnya layanan kesekretariatan DPRD yang berkualitas Melalui Pengelolaan Kelembagaan		Tingkat Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Baik	Baik	Baik	
	Meningkatnya Kualitas Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP Lingkup OPD	Nilai 88 (79)	Nilai 88 (72,05)*	Nilai A	
	Meningkatnya Cakupan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi		Cakupan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	100%	100%	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Cakupan Perda yang Diinisiasi DPRD	100%	100%	100%	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD
			Cakupan Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif yang Ditindaklanjuti	100%	100%*	100%	
		Rancangan peraturan daerah yang dibahas dan disetujui	jumlah rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD yang disusun	12 Perda	12 Perda	12 Perda	
		Kegiatan hearing/dialog pimpinan dan anggota DPRD dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama yang difasilitasi	Jumlah hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	480 orang	895 orang*	480 Orang	
		Rapat alat kelengkapan dewan yang difasilitasi	jumlah rapat alat kelengkapan dewan	225 kali	193 kali*	480 Kali	
		Rapat paripurna yang difasilitasi	jumlah rapat paripurna	46 kali	39 kali	46 Kali	
		Kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi	jumlah kegiatan reses anggota DPRD	2 kali	2 kali	3 Kali	
		Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi	Jumlah SPPD kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	1950 SPPD	5.395 SPPD	2860 SPPD	
		Kegiatan peningkatan kapasitas (bimtek/workshop) yang diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD	jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang mengikuti bimtek/workshop/ pelatihan lainnya	65 orang	130 orang	65 Orang	
		Publikasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi	jumlah sosialisasi/publikasi kegiatan DPRD	36 kali	34 kali	36 Kali	

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2025, Catatan: Data April 2024

4.2 LANGKAH YANG AKAN DIAMBIL UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG SEBAGAI RENCANA TINDAK LANJUT.

Sekretariat DPRD NTB Sebagai institusi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan tentunya sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD NTB, adanya semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi yang ditunjukkan melalui

kesungguhan, kejujuran, keterbukaan dalam melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan yang telah dirumuskan sehingga akuntabilitas kinerja instansi dapat dicapai dengan optimal. Selanjutnya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menindaklanjuti hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 dalam bentuk penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) Sesuai dengan Rekomendasi yang diberikan, sebagai berikut:

A. PERBAIKAN PADA PERENCANAAN KINERJA

1. Melakukan perbaikan pada pohon kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan hubungan sebab akibat dan kerangka logis serta hasil yang outcome.
2. Melakukan Penyelarasan Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026 Revisi dengan Tujuan dan Sasaran pada Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra Revisi Sekretariat DPRD NTB Tahun 2024-2026, Renja Tahun 2025, dsb)
3. Melakukan perbaikan pada cascading dengan memperhatikan hubungan sebab akibat tiap level penjenjangan, serta menambahkan :
 - Crosscutting.
 - Formula perhitungan capaian atas target pada level eselon II dan III, Pejabat pengampu kinerja sesuai levelnya, Indikator pada level operasional I, Sasaran, indikator, target, formula pada level operasional II
4. Pada Rencana Aksi telah disajikan Rencana Kinerja per triwulan dan Rencana Aksi Target Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan per triwulan.

B. PERBAIKAN PADA PENGUKURAN KINERJA

5. Mengkaji Penetapan Kinerja Eselon II dengan melakukan perubahan pada Dokumen PK Eselon II serta melakukan perbaikan pada dokumen PK eselon III agar mempunyai indikator kinerja yang bersifat hasil/outcome.
6. PK/SKP Fungsional dan Staf akan mengacu pada Indikator Kinerja Eselon III dan IV dan Indikator Kinerja Eselon III dan IV telah disesuaikan dengan levelnya mengacu pada Indikator Kinerja Eselon II yang telah disesuaikan dengan IKU PD pada Periode Renstra Revisi Sekretariat DPRD NTB Tahun 2024-2026.
7. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian Reward and Punishment ke setiap individu pegawai.
8. Menambah Item Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD, selain kuisioner pada Pimpinan dan Anggota DPRD NTB juga kuisioner pada Masyarakat untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Sekretariat DPRD dan DPRD Provinsi NTB di 10 Kab/Kota, 8 Dapil dengan 1600 Sampel Responden selama 1 tahun di Tahun 2025.

9. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja tetap dilakukan secara berkala dan hal tersebut dijadikan sebagai dasar pemberian Reward and Punishment seperti dalam Pemberian TPP.

C. PERBAIKAN PADA PELAPORAN KINERJA

10. Memperbaiki dokumen rencana aksi dengan menyajikan target rencana kinerja pada tiap triwulan serta memberikan penjelasan lebih detail dan terperinci terhadap target kinerja yang tidak atau belum tercapai.
11. Termasuk juga dengan menambah Item Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD, selain kuisioner pada Pimpinan dan Anggota DPRD NTB juga kuisioner pada Masyarakat untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja Sekretariat DPRD dan DPRD Provinsi NTB di 10 Kab/Kota, 8 Dapil dengan 1600 Sampel Responden selama 1 tahun di Tahun 2025.

D. PERBAIKAN PADA EVALUASI INTERNAL

12. Evaluasi Capaian Kinerja Internal telah dilakukan secara berkala dan dilakukan secara berjenjang dari tingkat Pimpinan hingga pelaksana/ staf. Evaluasi.
13. Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) dalam rangka melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas hasil evaluasi SAKIP dan melaporkan secara berkala kepada Pimpinan serta Inspektorat sebagai bagian dari perbaikan internal berkelanjutan.

E. PERBAIKAN PADA PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI

14. Menindaklanjuti Hasil evaluasi AKIP oleh APIP dalam langkah langkah yang nyata untuk perbaikan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah melalui Konsultasi, Asistensi, Diskusi dan Mengikuti Bimtek/Workshop dan dilakukan perbaikan secara komprehensif diawali dengan penyesuaian Pohon kinerja, cascading, IKU dan PK, Renstra Revisi PD Tahun 2024-2026, Renja 2025 dan Renja 2026.
15. Mendorong peningkatan komitmen, kompetensi, serta jumlah SDM pengelola akuntabilitas agar lebih optimal dalam mengawal implementasi SAKIP Perangkat Daerah dengan melakukan Rapat Internal Lingkup Sekretariat DPRD Provinsi NTB yang dihadiri oleh Eselon II, III, IV, Fungsional dan Subkoordinator masing masing sub bagian untuk membahas Perbaikan, penyesuaian dan penelarasan Dokumen Perencanaan PD dengan PK, SKP yang akan termuat dalam Aplikasi E-Kinerja, E-Sakip.
16. Pencapaian target Output, target Outcome, Penyajian Informasi Capaian Outcome akan diupayakan lebih baik dari tahun sebelumnya sesuai dengan Periodisasi Renstra Revisi Sekretariat DPRD NTB Tahun 2024-2026.

Sekretariat DPRD NTB sebagai Institusi yang melaksanakan pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 yang memuat Tujuan, Sasaran, kebijakan dan program instansi yang implementasinya dituangkan dalam Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2024. Secara umum capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB pada tahun 2024 telah memenuhi target yang tercantum dalam perjanjian kinerja maupun Rencana Strategis.

Hasil penilaian unsur pelayanan kepada DPRD menunjukkan bahwa beberapa unsur menunjukkan nilai yang baik, yaitu unsur Kualitas, ketepatan, dan kecepatan dalam menyiapkan dukungan kegiatan workshop Anggota DPRD; Kelengkapan, kenyamanan, dan kebersihan layanan ruang rapat paripurna dan ruang rapat AKD; Kecepatan dan ketepatan Sekretariat DPRD NTB dalam memberikan layanan Administrasi Keuangan terkait kegiatan Reses anggota DPRD dan unsur Kecepatan dan ketepatan Sekretariat DPRD NTB dalam memberikan layanan Administrasi Keuangan terkait kegiatan Perjalanan Dinas anggota DPRD.

Dengan telah diselesaikannya penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD NTB, maka kinerja Sekretariat DPRD NTB dapat diketahui pencapaiannya selama kurun waktu Tahun 2024, Segala yang termuat dan tertuang dalam LKjIP merupakan pedoman untuk menentukan langkah serta arah kinerja yang tepat di masa mendatang, sehingga perjalanan pembangunan dapat berdayaguna dan berhasil guna sesuai harapan. Ada beberapa unsur pelayanan kepada DPRD yang masih perlu ditingkatkan dan menjadi perhatian Sekretariat DPRD NTB dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada tahun-tahun selanjutnya, yaitu :

- i. Penataan kembali Struktur Organisasi kelembagaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB agar ada kesesuaian antara tugas fungsi dengan bagian lainnya.
- ii. Perbaikan Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Kinerja, Pengelolaan Keuangan dan Pengadministrasian Barang Milik Negara dan Perjalanan Dinas.
- iii. Peningkatan Kualitas Layanan Persidangan, Pengembangan Strategi dan Komunikasi Parlemen, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Produk Perundang-undangan.
- iv. Pengelolaan SDM, Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2024 ini dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mataram, Januari 2025
SEKRETARIS DPRD PROVINSI NTB



Drs. H. SURYA BAHARI, MMPd.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680219 198811 1 001

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Tahunan (PK) Eselon II, III, IV, Fungsional dan Staf Sekretariat DPRD NTB
- Lampiran 2 : Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD NTB
- Lampiran 3 : Capaian Indikator Kinerja Sasaran (RPD 2024-2026)
- Lampiran 4 : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024
- Lampiran 5 : Rencana Aksi berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK)
- Lampiran 6 : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD NTB Tahun 2024
- Lampiran 7 : Capaian Rencana Aksi
- Lampiran 8 : Capaian Perjanjian Kinerja (PK) Triwulan IV Tahun 2024
- Lampiran 9 : SOP Pengumpulan Data Kinerja